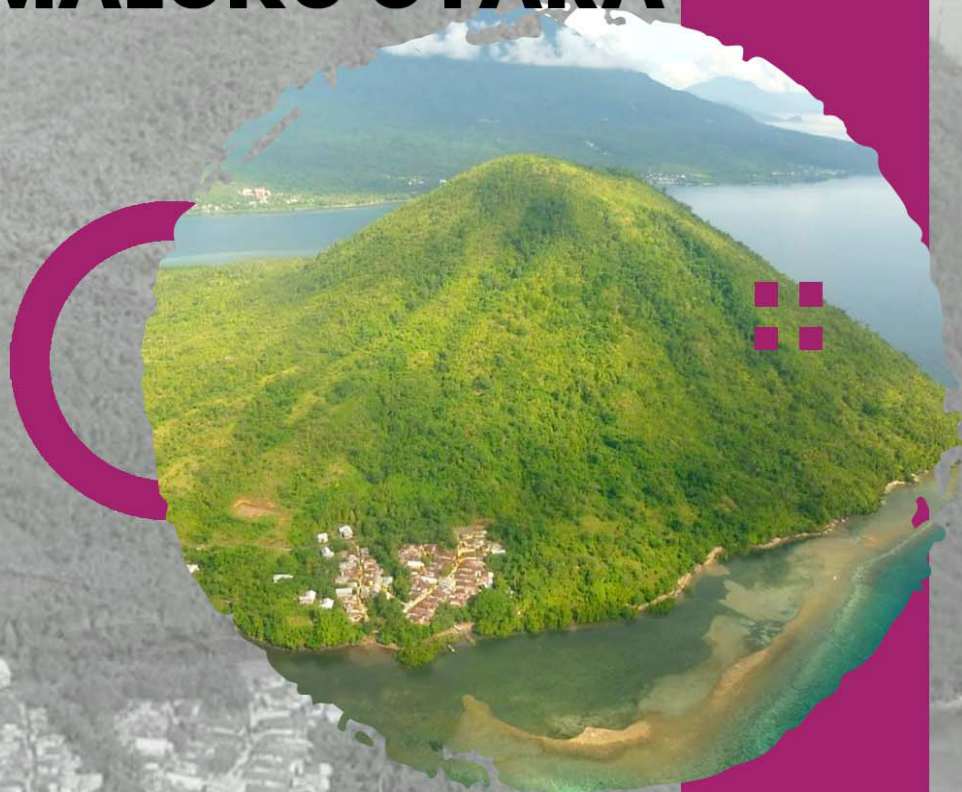


**PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI MALUKU UTARA





Peta Pembinaan Provinsi Maluku Utara

Jakarta: Bina Praja Press, 2022
Copyright © BSKDN Kemendagri

Penyunting : Aji Nur Cahyo
Desain sampul, grafis dan penata letak : Fajar Haramukti

Diterbitkan dan dicetak oleh Bina Praja Press
Dikeluarkan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri

ISBN : 978-623-88614-1-5

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



Alamat Redaksi:
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
pid@litbangkemendagri.com
Telp. (021) 3913201

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TIM PENULIS

Pengarah:

Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal

Penanggungjawab:

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

Penulis:

1. Sindy Tervia, S.Stat
2. Ingan Ginting, S.E
3. Gunawan Adi Saputra Silalahi, S.STP

SAMBUTAN KEPALA BSKDN KEMENDAGRI

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Era Revolusi 4.0 menuntut kesiapan aparatur yang andal, unggul untuk peningkatan daya saing bagi daerah. Buku ini, secara kompleks menggambarkan penerapan inovasi daerah. Kemajuan IPTEK menjadi salah satu landasan berpikir bagi daerah dalam mempersiapkan aktor inovasi daerah yang dapat bersaing di kancah Internasional. Pengembangan inovasi menjadi kekuatan untuk meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan potensinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala nasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan program daya saing daerah.

Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Saya berbangga hati terhadap Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berinovasi. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semangat daerahku, semangat bangsaku, maju daerahku. Salam Inovasi.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala Badan Strategi
Kebijakan Dalam Negeri
Kemendagri

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

SAMBUTAN KEPALA PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH

Saat ini kebutuhan inovasi menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah. Daerah dengan segala keterbatasannya, mampu menghadirkan inovasi sebagai solusi untuk percepatan akselerasi pembangunan. Amati, Tiru dan Modifikasi menjadi sesuatu yang semestinya disikapi oleh daerah dalam berinovasi. Ide kreatif inovator memberikan ruang dan suasana baru bagi inovasi, apresiasi kami sangat tinggi terhadap adanya perubahan mindset. Inovasi bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi keharusan bagi daerah untuk berbuat seberapa besar dan seberapa banyak inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat. Data Indeks menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengawal inovasinya. Mulai dari kelengkapan data pendukung sebagai dokumentasi, publikasi inovasi, maupun pelibatan stakeholder antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota, OPD dengan OPD lainnya, maupun antara Masyarakat dengan ASN. Kolaborasi dan elaborasi menjadi cerminan bahwa inovasi daerah menjembatani koordinasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan inovasi daerah.

Keberanian dan tumbuh kembangnya inovasi daerah di tingkat provinsi/Kabupaten/Kota karena didasarkan pada beberapa hal. Pertama daerah sudah menyadari inovasi daerah tidak terkait /dengan diskresi, kedua, daerah menyadari bahwa adanya inovasi daerah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sepihak, ketiga, inovasi daerah menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, keempat, penilaian Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah membahas mengenai indeks inovasi daerah, kelima adanya Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi ASN di daerah dengan memperhitungkan bobot perhitungan indeks inovasi daerah.

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman efektivitas pengembangan inovasi daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri. Buku ini khusus mengulas inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di daerah, tahun 2019, 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui penerapan indeks inovasi daerah tahun 2021. Dengan demikian, buku ini sekaligus menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Memainkan peranan sebagai unsur pembinaan dan pengawasan dalam inovasi daerah. Bukan hanya pengawasan yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri terhadap Provinsi/Kabupaten/Kota, namun juga bagaimana kementerian teknis turut andil di dalam mengembangkan inovasi.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah

Drs. Aferi S. Fudail, M.Si

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ atau Insentif Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA), dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai tahun pembuktian bagi daerah. Sebanyak 25.124 inovasi daerah yang termuat dalam IID dilakukan oleh Provinsi/ Kabupaten/Kota, Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan meramaikan inovasi dengan dominasi dari berbagai aspek. Aspek Pelayanan publik sebanyak 14.580 inovasi, dilanjutkan dengan inovasi bentuk lainnya sebanyak 6.668 inovasi, dan inovasi tata kelola pemerintahan sebanyak 3.606 inovasi terdiri atas : (1) Kategori Provinsi Terinovatif 5 Pemda Provinsi; (2) Kategori Kabupaten Terinovatif 10 Pemda Kabupaten; (3) Kategori Kota Terinovatif 10 Pemda Kota; (4) Kategori Daerah Tertinggal Terinovatif 3 Pemda Kabupaten; (5) Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif 3 Pemda Kabupaten.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala internasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/ Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan program daya saing daerah. Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnyanya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. MANFAAT	2
C. TUJUAN	2
D. RUANG LINGKUP	3

BAB II INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN DAN KLASTER KOTA

A. KABUPATEN HALMAHERA BARAT	5
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	5
Aspek Satuan Inovasi Daerah	6
B. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	12
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	13
Aspek Satuan Inovasi Daerah	14
C. KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	19
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	20
Aspek Satuan Inovasi Daerah	20
D. KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	27
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	27
E. KABUPATEN HALMAHERA UTARA	28
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	29
Aspek Satuan Inovasi Daerah	29
F. KABUPATEN KEPULAUAN SULA	35
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	35
Aspek Satuan Inovasi Daerah	36
G. KABUPATEN PULAU TALIBU	41
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	41
H. KABUPATEN PULAU MOROTAI	42
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	42
Aspek Satuan Inovasi Daerah	43
I. KOTA TERNATE	52
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	52
Aspek Satuan Inovasi Daerah	53
J. KOTA TIDORE KEPULAUAN	59
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	60

BAB III PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI

61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Halmahera Barat

Gambar 2. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Halmahera Barat

Gambar 3. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Halmahera Barat

Gambar 4. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Halmahera Barat

Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Halmahera Barat

Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Halmahera Barat

Gambar 7. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Halmahera Barat

Gambar 8. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Halmahera Barat

Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Halmahera Barat

Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kabupaten Halmahera Barat

Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Halmahera Selatan

Gambar 13. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Halmahera Selatan

Gambar 14. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Halmahera Selatan

Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Halmahera Selatan

Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Halmahera Selatan

Gambar 17. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Halmahera Selatan

Gambar 18. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Halmahera Selatan

Gambar 19. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Halmahera Selatan

Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Halmahera Selatan

Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kabupaten Halmahera Selatan

Gambar 23. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Halmahera Tengah

Gambar 24. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Halmahera Tengah

Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Halmahera Tengah

Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Halmahera Tengah

Gambar 27. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Halmahera Tengah

Gambar 28. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Halmahera Tengah

Gambar 29. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiatif/Inovasi pada Kabupaten Halmahera Tengah

Gambar 30. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Halmahera Tengah

Gambar 31. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Halmahera Tengah

Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Tengah

Gambar 33. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kabupaten Halmahera Tengah

Gambar 34. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Halmahera Timur

Gambar 35. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Halmahera Timur

Gambar 36. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Halmahera Utara

Gambar 37. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Halmahera Utara

Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Halmahera Utara

Gambar 39. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Halmahera Utara

Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Halmahera Utara

Gambar 41. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Halmahera Utara

Gambar 42. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Halmahera Utara

Gambar 43. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Halmahera Utara

Gambar 44. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Halmahera Utara

Gambar 45. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Utara

Gambar 46. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kabupaten Halmahera Utara

Gambar 47. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kepulauan Sula

Gambar 48. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kepulauan Sula

Gambar 49. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kepulauan Sula

Gambar 50. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kepulauan Sula

Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kepulauan Sula

Gambar 52. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kepulauan Sula

Gambar 53. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Kepulauan Sula

Gambar 54. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kepulauan Sula

Gambar 55. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kepulauan Sula

Gambar 56. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula

Gambar 57. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kabupaten Kepulauan Sula

Gambar 58. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Pulau Talibu

Gambar 59. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Pulau Talibu

Gambar 60. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Pulau Morotai

Gambar 61. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Pulau Morotai

Gambar 62. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Pulau Morotai

Gambar 63. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Pulau Morotai

Gambar 64. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Pulau Morotai

Gambar 65. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Pulau Morotai

Gambar 66. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Pulau Morotai

Gambar 67. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Pulau Morotai

Gambar 68. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Pulau Morotai

Gambar 69. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pulau Morotai

Gambar 70. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kabupaten Pulau Morotai

Gambar 71. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Ternate

Gambar 72. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Ternate

Gambar 73. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Ternate

Gambar 74. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Ternate

Gambar 75. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Ternate

Gambar 76. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Ternate

Gambar 77. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Ternate

Gambar 78. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Ternate

Gambar 79. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Ternate

Gambar 80. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Ternate

Gambar 81. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kota Ternate

Gambar 82. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Tidore Kepulauan

Gambar 83. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Tidore Kepulauan

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

Tabel 2. Daftar Inovasi Kabupaten Halmahera Barat beserta Skor Kematangannya

Tabel 3. Daftar Inovasi Kabupaten Halmahera Selatan beserta Skor Kematangannya

Tabel 4. Daftar Inovasi Kabupaten Halmahera Tengah beserta Skor Kematangannya

Tabel 5. Daftar Inovasi Kabupaten Halmahera Utara beserta Skor Kematangannya

Tabel 6. Daftar Inovasi Kabupaten Kepulauan Sula beserta Skor Kematangannya

Tabel 7. Daftar Inovasi Kabupaten Pulau Morotai beserta Skor Kematangannya

Tabel 8. Daftar Inovasi Kabupaten Pulau Morotai beserta Skor Kematangannya

Tabel 9. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Halmahera Barat Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 10. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Halmahera Barat

Tabel 11. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 12. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Halmahera Selatan

Tabel 13. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Halmahera Tengah

Tabel 14. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Halmahera Timur Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 15. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Halmahera Utara Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 16. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Halmahera Utara

Tabel 17. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Kepulauan Sula Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 18. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Kepulauan Sula

Tabel 19. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Pulau Talibu Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 20. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Pulau Morotai

Tabel 21. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Pulau Morotai

Tabel 22. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kota Tidore Kepulauan Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

The Page Left is Blank

An aerial photograph of a mountainous region, heavily forested. In the lower-left foreground, a small village with several buildings is visible. The background shows more mountain peaks under a clear sky. The entire image is overlaid with a semi-transparent purple filter.

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Adapun pelaksanaannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mendorong optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan konteks dan dinamika di masing-masing daerah. Upaya tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Sesuai dengan amanat regulasi diatas, Kementerian Dalam Negeri telah menyelenggarakan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian inovasi daerah didasarkan pada laporan Kepala Daerah atas pelaksanaan inovasi daerah bersangkutan melalui mekanisme pengisian data indeks inovasi daerah. Secara general, penilaian inovasi daerah melalui empat (4) tahapan yaitu: Tahap Penjaringan, Tahap Pengukuran, Tahap Presentasi Kepala Daerah dan Tahap Peninjauan Lapangan. Sedangkan untuk pelaksanaan *Innovative Government Award* (IGA), kegiatan tersebut telah diselenggarakan pada tahun 2017 dan mulai tahun 2018 penilaian IGA diperkuat dengan aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri melakukan penjaringan atas berbagai macam data inovasi yang pemerintah daerah lakukan, baik itu berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, maupun inovasi lainnya sesuai dengan urusan kewenangan daerah. Pada tahun 2021 lalu, Kementerian Dalam Negeri telah menghimpun sebanyak 25.124 inovasi yang dilaporkan oleh 519 pemda melalui aplikasi indeks inovasi daerah pada laman indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id. Inovasi tersebut mengalami eskalasi yang tajam dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu: pada tahun 2018 lalu diikuti oleh 188 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 3.718, tahun 2019 diikuti oleh 260 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 8.016 dan di tahun 2020 diikuti oleh 484 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 17.779. Kenaikan jumlah inovasi tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan reformasi dan transformasi organisasional, dengan penekanan pada peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*) dan lebih baik (*better*) baik melalui inovasi digital maupun inovasi non-digital.

Adapun penilaian indeks inovasi daerah tahun 2021 lalu diperoleh hasil: 37 Pemerintah Daerah berkategori Sangat Inovatif, 316 Pemerintah Daerah berkategori Inovatif, 166 Pemerintah Daerah berkategori Kurang Inovatif dan 23 Pemerintah Daerah berkategori Tidak Dapat Dinilai. Selanjutnya Penerima Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap daerah dengan kategori 5 Provinsi Terinovatif, 10 Kabupaten Terinovatif, 10 Kota Terinovatif, 3 Daerah Perbatasan Terinovatif dan 3 Daerah Tertinggal Terinovatif. Sementara khusus untuk klaster daerah kabupaten/kota terinovatif kategori

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejauh ini belum dapat diberikan mengingat rendahnya partisipasi pelaporan inovasi daerah di wilayah tersebut.

Penerima penghargaan *Innovative Government Award* merupakan daerah yang tidak hanya mampu menghasilkan inovasi dari sisi kuantitas namun juga kualitas (kematangan inovasi) serta memiliki komitmen kuat dalam mendorong budaya inovasi di daerahnya. Hal tersebut direpresentasikan dengan upaya pelembagaan inovasi dan kemampuan mensinergikan antara kepemimpinan, sumber daya, kemampuan berkolaborasi dalam mencapai kemanfaatan inovasi untuk masyarakat.

Hadirnya inovasi tersebut tentu memperkuat simpul-simpul pertumbuhan nasional, sebab inovasi pastinya diciptakan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan seperti isu kemiskinan, kesenjangan wilayah, defisit infrastruktur, keterbatasan anggaran dan sebagainya. Adanya inovasi akan menopang peningkatan daya saing daerah, yang pada akhirnya berakumulasi pada naiknya daya saing nasional. Menurut laporan survey *World Competitiveness Yearbook (WCY)* 2021, daya saing Indonesia naik menjadi peringkat 37 dari sebelumnya peringkat 40 di tahun sebelumnya. Jika ditelisik lebih dalam, dari 4 komponen utama penilaian survei (kondisi perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, infrastruktur), komponen efisiensi pemerintahan yang menyumbang tertinggi peningkatan daya saing. Ini menunjukkan efisiensi yang kita lakukan sudah ke arah yang tepat dan berdampak cukup signifikan.

Pemerintah daerah perlu berstrategi secara cermat agar inovasi yang dihadirkan dapat memberi manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Inovasi daerah memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti aspek kepemimpinan, kapasitas dan kompetensi kelembagaan, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung budaya organisasi yang tangguh, adaptif dan fleksibel. Pemerintah daerah dapat menempuh berbagai strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya tersebut mengacu pada pengaturan organisasi, manajemen data, dan jejaring atau kemitraan strategis. Untuk mendorong kinerja inovasi daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah; dan pemerintah daerah yang telah menerima penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah, dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui buku pembinaan inovasi daerah.

MANFAAT

Buku ini memberikan gambaran kinerja inovasi daerah di kabupaten/kota wilayah Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembinaan inovasi daerah baik oleh provinsi maupun kementerian/lembaga.

TUJUAN

Penyusunan Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan :

- a. Gambaran kinerja inovasi daerah;
- b. Bahan evaluasi kebijakan pembinaan inovasi daerah
- c. Bahan perumusan dan pengembangan kebijakan pembinaan inovasi daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah

RUANG LINGKUP

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman dari perkembangan kinerja inovasi daerah di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. Buku ini secara khusus mengulas inovasi daerah yang telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2019 dan 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Adapun pemerintah kabupaten/kota yang akan dideskripsikan dalam buku ini adalah Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Talibu, Kabupaten Pulau Morotai, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan.

Informasi capaian kinerja inovasi di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Maluku Utara yang disajikan, diharapkan dapat memberi gambaran perkembangan kekuatan dan kelemahan inovasi di wilayah tersebut baik dari Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) maupun Aspek Satuan Inovasi Daerah (SID). Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 2 aspek, 8 variabel dan 36 indikator. Aspek SPD memuat 3 variabel yaitu variabel Institusi, variabel Sumber Daya Manusia dan Jumlah Inovasi, serta variabel Ekosistem Inovasi dan Kajian. SPD terdiri atas 16 indikator yang merupakan indikator *output* dan *outcome*. Adapun Aspek SID terdiri dari 5 variabel yaitu variabel Infrastruktur, variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, variabel Kecepatan Bisnis Proses, variabel Kecanggihan Produk, serta variabel Hasil Kreatif. Pada aspek SID tersebut mencakup 20 indikator yang merupakan indikator input dan proses. Indikator input dan proses merupakan indikator pengaktif inovasi di suatu daerah. Tabel berikut merupakan daftar indikator Indeks Inovasi Daerah sesuai dengan variabel dan aspek masing-masing.

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
SPD	Institusi	Visi Misi
		Tingkat Lembaga Kelitbangan
		APBD Tepat Waktu
		Kualitas Peningkatan Perizinan
		Jumlah Pendapatan Perkapita
		Tingkat Pengangguran Terbuka
		Jumlah Peningkatan Investasi
		Jumlah Peningkatan PAD
		Opini BPK
		Nilai Capaian Lakip
		Penurunan Angka Kemiskinan
	Jumlah Inovasi, Ekosistem inovasi, dan Kajian	Jumlah Inovasi Daerah
		Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi
		Roadmap SiDA
SDM	Nilai IPM	
	Penghargaan Bagi Inovator	
SID	Hasil Kreatif	Kemanfaatan Inovasi
		Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
		Kualitas Inovasi Daerah

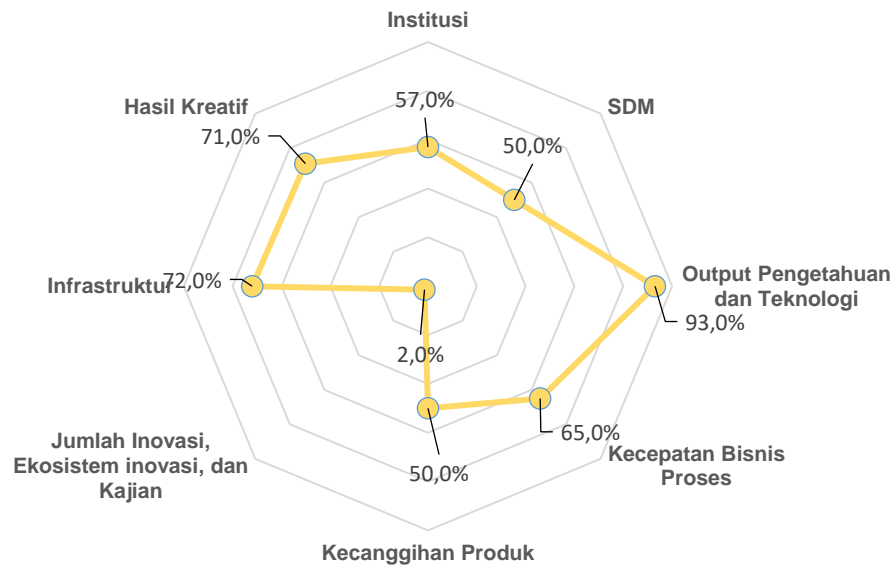
ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
	Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah
		Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah
		Dukungan Anggaran
		Penggunaan IT
		Bimtek Inovasi
		Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD
	Kecanggihan Produk	Replikasi
		Online Sistem
		Kecepatan Inovasi
	Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman Teknis
		Kemudahan Informasi Layanan
		Penyelesaian Layanan Pengaduan
		Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
	Output Pengetahuan dan Teknologi	Jejaring Inovasi
		Pelaksana Inovasi Daerah
		Keterlibatan aktor inovasi
Sosialisasi Inovasi Daerah		



BAB II

***INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN
DAN KLASTER KOTA***

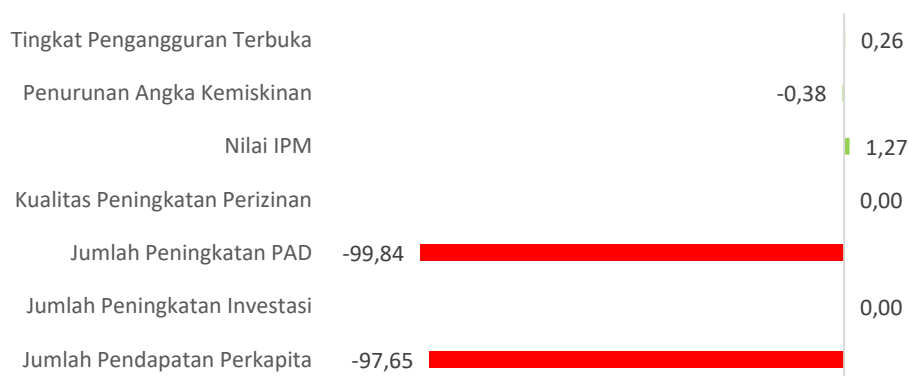
A. KABUPATEN HALMAHERA BARAT



Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Halmahera Barat

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Halmahera Barat memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, yaitu 93.0%. Artinya secara umum indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih rendah, yaitu 2.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



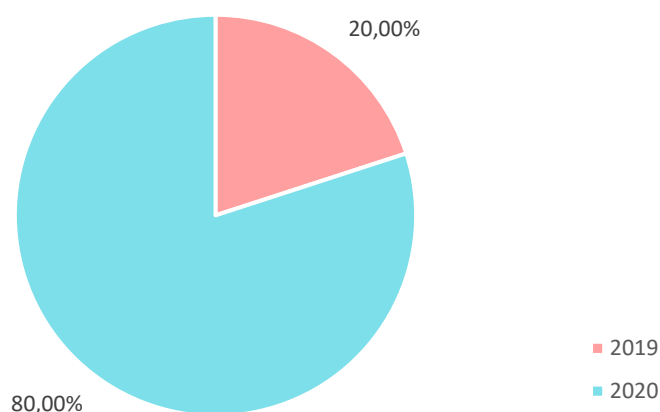
Gambar 2. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Halmahera Barat

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Halmahera Barat belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya perbaikan pada beberapa indikator yaitu peningkatan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.26%, artinya jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2020 turun sebesar 0.26% dibandingkan dengan tahun 2019. Nilai IPM pada Kabupaten Halmahera Barat naik sebesar 1.27% nilai tersebut sudah diatas standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap.

Terdapat beberapa indikator yang belum mengalami perbaikan yaitu Indikator Angka Kemiskinan yang menunjukkan penurunan sebesar 0.38%, artinya jumlah penduduk miskin pada Kabupaten Halmahera Barat meningkat, dimana nilai pada indikator tersebut belum sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya jumlah penduduk miskin turun 0.02%. Selanjutnya, indikator Kualitas Peningkatan Perizinan menunjukkan angka 0%, artinya tidak terjadi perubahan pada kualitas peningkatan perizinan dimana standar nasional parameter indeks seharusnya naik sebesar 5%. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat juga mengalami penurunan pada indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 99.84% dimana nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 8%. Demikian juga dengan Jumlah Pendapatan Perkapita yang turun sebesar 97.65% dimana nilai tersebut lebih tinggi dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya hanya turun sebesar 1.85%. Sedangkan indikator Jumlah Peningkatan Investasi menunjukkan angka 0%, artinya tidak terjadi perubahan dimana seharusnya standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan peningkatan sebesar 0.45%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

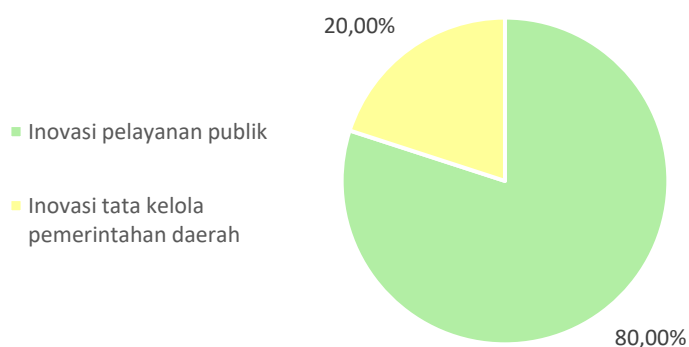
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 3. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Halmahera Barat

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Barat telah diterapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 20% (1 inovasi) dari 5 inovasi yang dilaporkan, dan 80% atau 4 inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

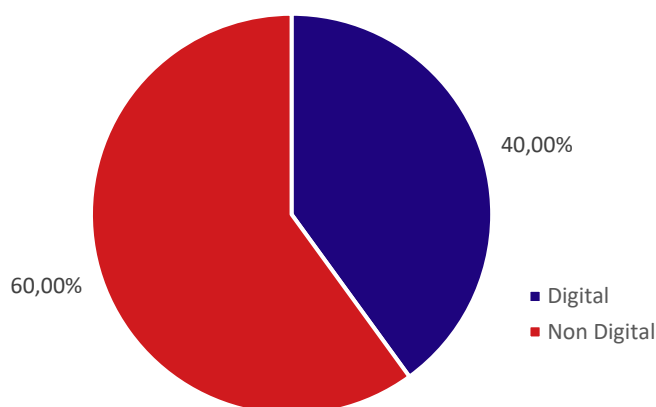
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 4. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Halmahera Barat

Berdasarkan bentuk inovasi, hanya terdapat 2 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Barat, yaitu inovasi pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintah daerah. Mayoritas inovasi yang dilaporkan adalah inovasi pelayanan publik sebesar 80% (4 inovasi) dan 20% atau 1 inovasi lainnya adalah inovasi tata kelola pemerintahan daerah.

c. Berdasarkan Jenis Inovasi

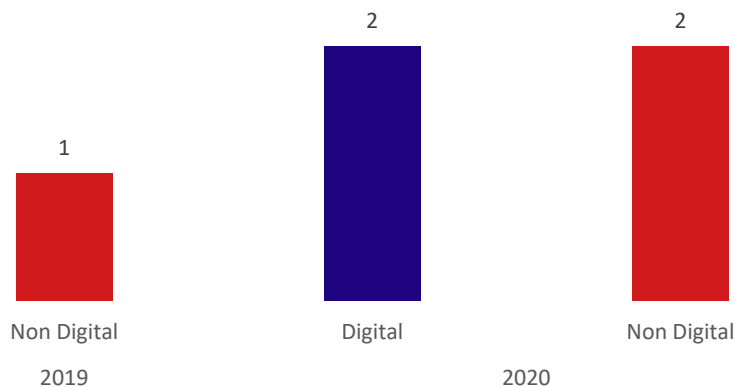


Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Halmahera Barat

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, terdapat 2 jenis inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Barat yaitu inovasi digital dan inovasi non digital. Mayoritas jenis inovasi yang dilaporkan adalah inovasi non digital

sebesar 60% (3 inovasi) dari 5 inovasi daerah yang dilaporkan, dan 40% (2 inovasi) lainnya merupakan inovasi digital.

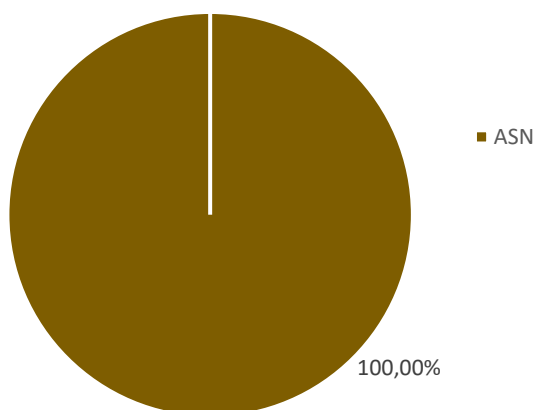
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Halmahera Barat

Dapat dilihat bahwa jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dimana pada tahun 2019 inovasi non digital yang diterapkan sejumlah 1 inovasi kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 2 inovasi. Demikian pula dengan inovasi digital juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 tidak ada inovasi digital yang dilaporkan lalu pada tahun 2020 menjadi 2 inovasi digital.

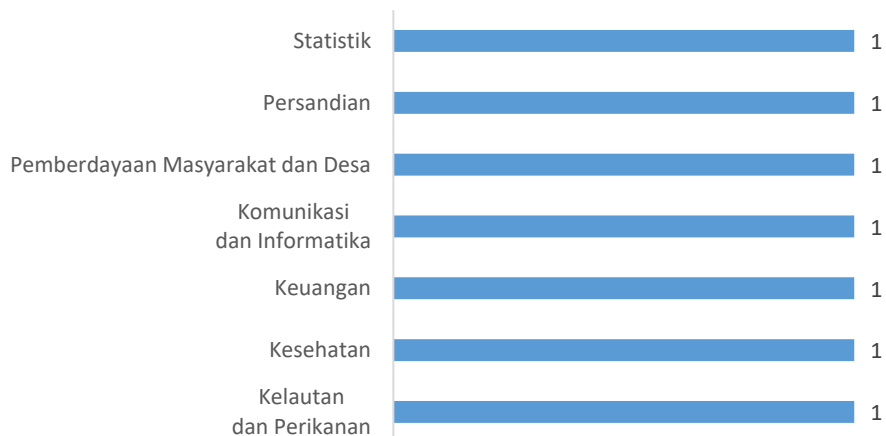
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 7. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Halmahera Barat

Seluruh inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2021 diinisiasi oleh ASN, yaitu sebesar 100% (5 inovasi). Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah, DPRD, dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

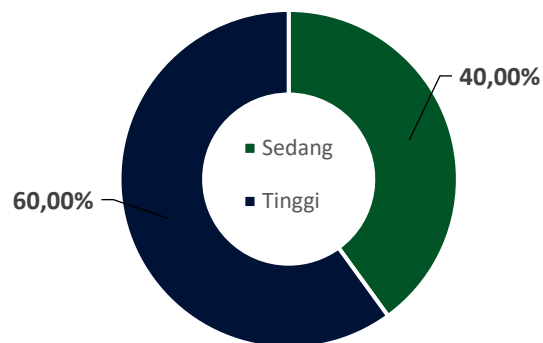
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 8. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Halmahera Barat

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata yang tersebar di 7 urusan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, hanya terdapat 1 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan dengan 1 inovasi, sementara untuk urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum dilaporkan.

g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan

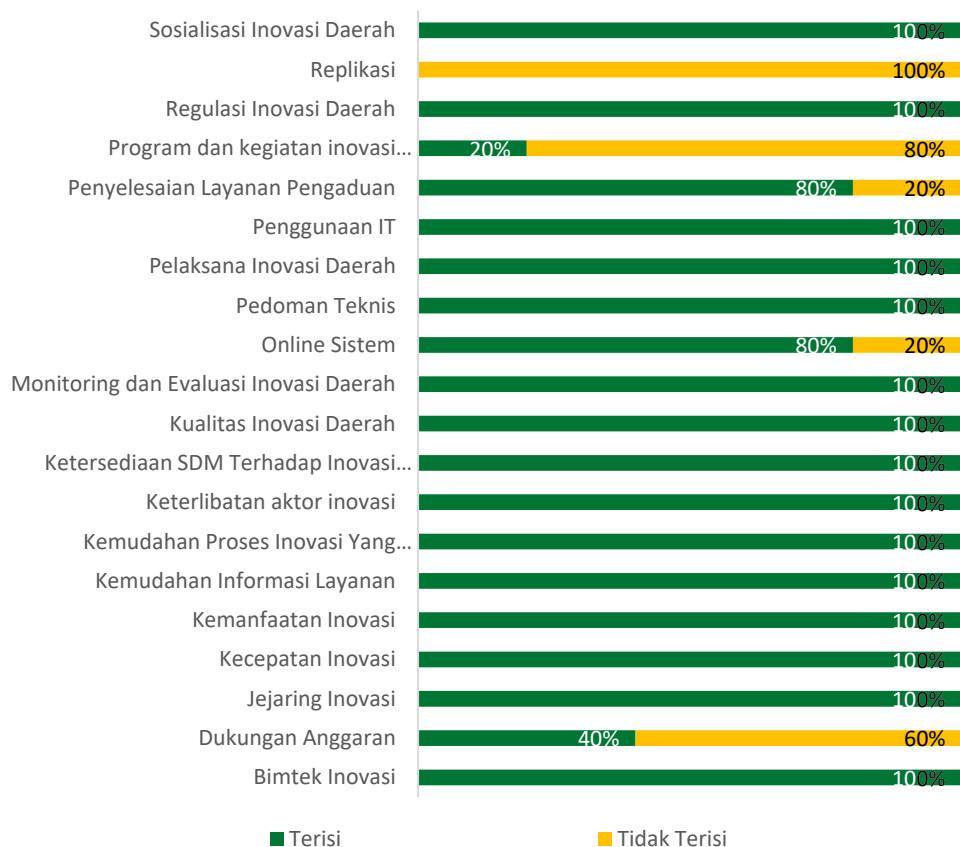


Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Halmahera Barat

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang dan tinggi, dimana terdapat 60% (3 inovasi) termasuk kategori skor kematangan tinggi. Sedangkan 40% (2 inovasi) lainnya sudah mencapai skor kematangan sedang. Skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor

sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

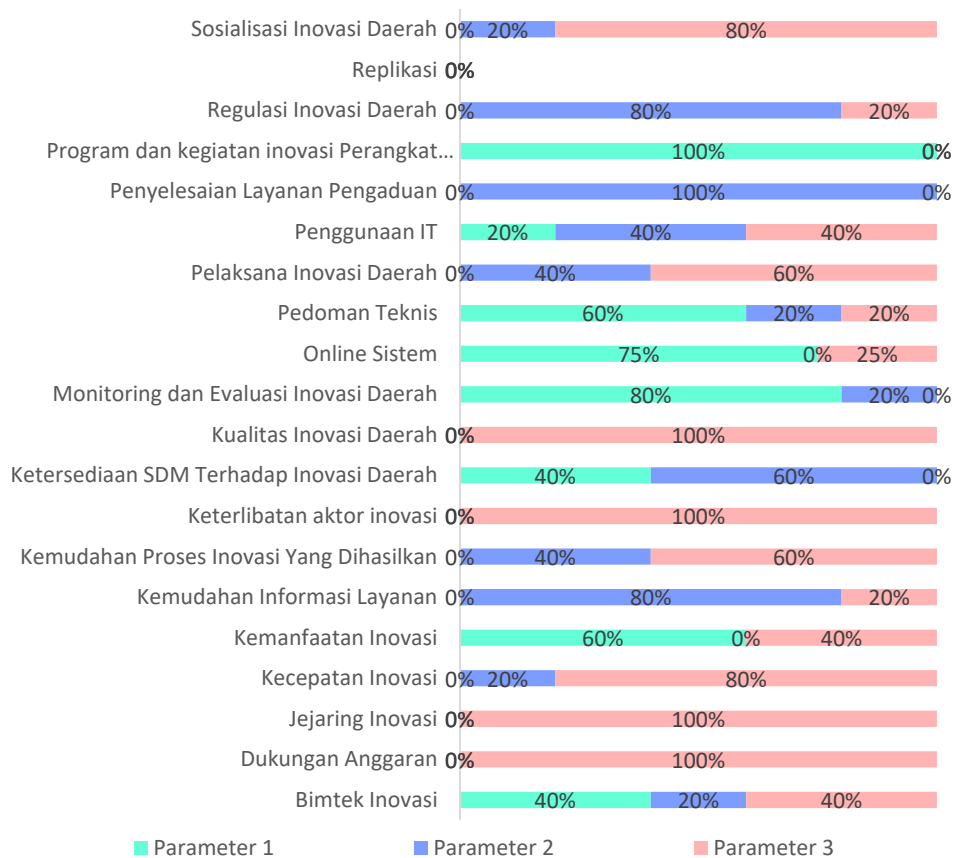


Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Dari 5 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Barat, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 14% sedangkan 86% lainnya telah terisi data pendukung. Ada beberapa indikator dengan tingkat keterisian 100%, yaitu Indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Penggunaan IT, Pelaksana Inovasi Daerah, Pedoman Teknis, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, Keterlibatan Aktor Inovasi, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, Kemudahan Informasi Layanan, Kemanfaatan Inovasi, Kecepatan Inovasi, Jejaring Inovasi dan Bimtek Inovasi. Artinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Barat telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 0% artinya inovasi yang dilaporkan tidak terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kabupaten Halmahera Barat

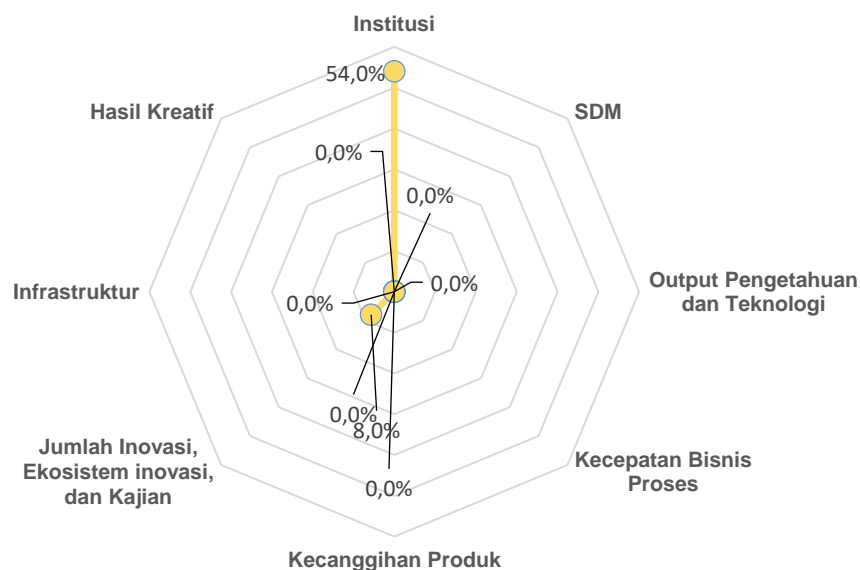
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, Jejaring Inovasi, dan Dukungan Anggaran masing-masing sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter pertama, namun perlu diperhatikan bahwa inovasi yang mengisi Indikator Program Dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD hanya 1 inovasi.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Halmahera Barat beserta Skor Kematangannya

Tabel 2. Daftar Inovasi Kabupaten Halmahera Barat beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
GERAKAN SADAR INFORMASI	109
KOPI PERIKANAN HALBAR (Komunitas Peduli Industri Perikanan Halmahera Barat)	105
SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN TERINTEGRASI (SOLUSI HEBAT) HALMAHERA BARAT	102
STRATEGI PENGEMBANGAN BUMDES UNGGULAN BERBASIS KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT (SAGU HALBAR)	86
SEHAT BALITA SEHAT DESAKU (SASADU)	78

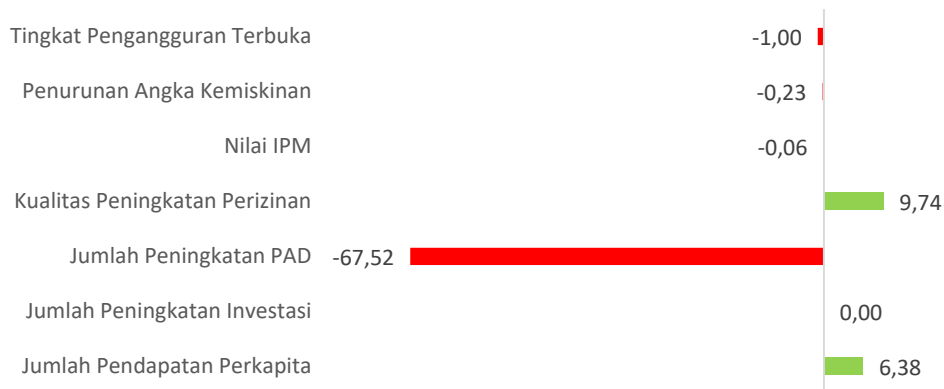
B. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Halmahera Selatan

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Halmahera Selatan memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 54.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Institusi memiliki capaian skor yang mendekati parameter 2. Mayoritas variabel indeks inovasi daerah pada Kabupaten Halmahera Selatan memiliki skor 0% yaitu variabel SDM, Hasil Kreatif, Infrastruktur, Kecanggihan Produk, Kecepatan Bisnis Proses, Ouput Pengetahuan dan Teknologi. Artinya indikator – indikator pada variabel tersebut tidak terisi data pendukung.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



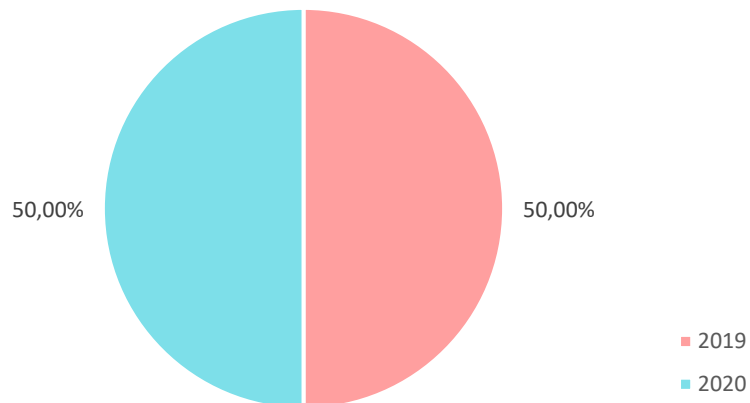
Gambar 13. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Halmahera Selatan

Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Halmahera Selatan belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1%. Artinya jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2020 meningkat sebesar 1% dibandingkan tahun 2019. Dimana nilai pada indikator tersebut belum sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya jumlah pengangguran terbuka hanya naik sebesar 0.92%. Selanjutnya indikator Angka Kemiskinan menunjukkan penurunan sebesar 0.23% artinya jumlah penduduk miskin pada Kabupaten Halmahera Selatan naik sebesar 0.23% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana nilai pada indikator tersebut belum sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya jumlah penduduk miskin turun sebesar 0.02%. Demikian juga dengan indikator Nilai IPM yang turun sebesar 0.06% dimana nilai tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap.

Kualitas Peningkatan Perizinan pada Kabupaten Halmahera Selatan mengalami peningkatan sebesar 9.74% dimana nilai tersebut lebih besar dan sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks sebesar 5%. Jumlah Peningkatan PAD Kabupaten Halmahera Selatan turun sebesar 67.52% dimana nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 8%. Sedangkan Indikator Jumlah Peningkatan Investasi menunjukkan angka 0% artinya tidak terjadi perubahan pada jumlah peningkatan investasi dimana seharusnya standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan peningkatan sebesar 0.45%. Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan peningkatan sebesar 6.38%, dimana nilai tersebut sudah diatas standar nasional indeks inovasi daerah yang memiliki batas penurunan sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

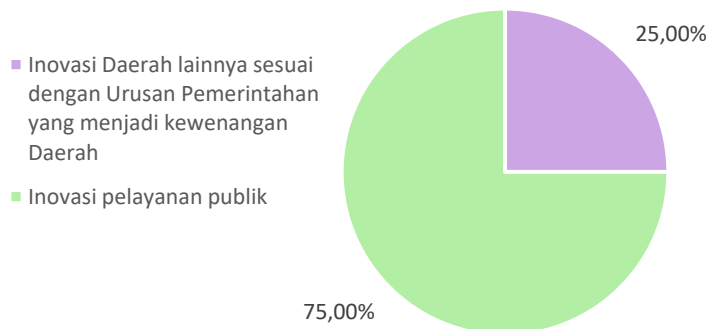
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 14. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Halmahera Selatan

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Selatan yang telah diterapkan pada tahun 2019 dan tahun 2020 memiliki proporsi yang seimbang. Terdapat 2 (50%) inovasi dari 4 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan pada tahun 2019 dan 2 (50%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

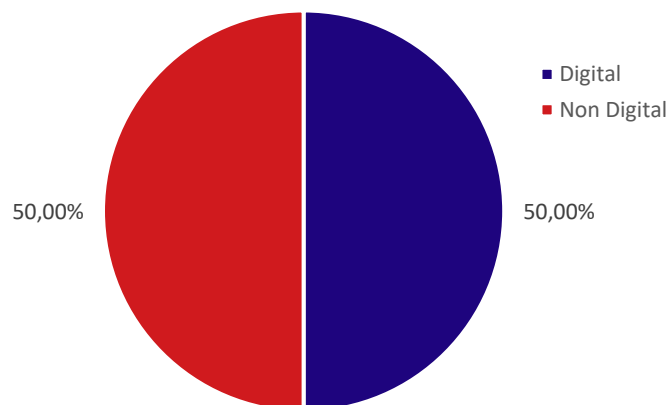


Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Halmahera Selatan

Berdasarkan bentuk inovasi, hanya terdapat 2 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sementara inovasi bentuk lainnya belum melaporkan. Mayoritas inovasi pada Kabupaten Halmahera Barat adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 3 (75%) inovasi dan 1 (25%) inovasi lainnya

adalah inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

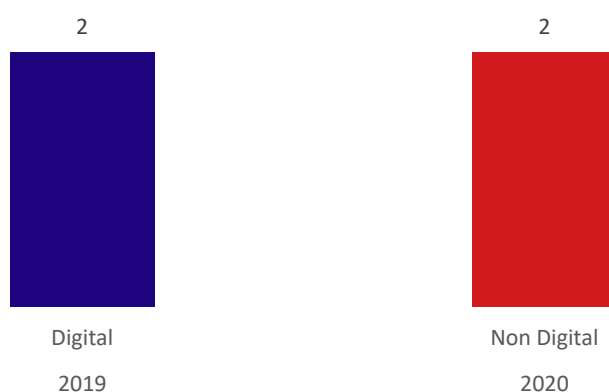
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Halmahera Selatan

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, terdapat 2 jenis inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Selatan yaitu inovasi digital dan inovasi non digital, dimana 50% (2 inovasi) dari 4 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Halmahera Selatan merupakan inovasi non digital dan 50% (2 inovasi) lainnya merupakan inovasi digital.

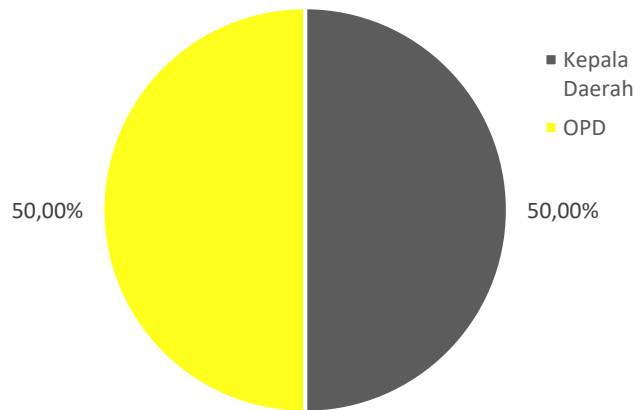
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 17. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Halmahera Selatan

Secara jumlah inovasi tahun 2019 merupakan inovasi digital sejumlah 2 inovasi dimana tahun 2019 tidak ada inovasi digital yang dilaporkan. Sedangkan tahun 2020 inovasi yang diterapkan merupakan inovasi non digital sejumlah 2 inovasi, sementara pada tahun tersebut tidak ada inovasi non digital yang dilaporkan.

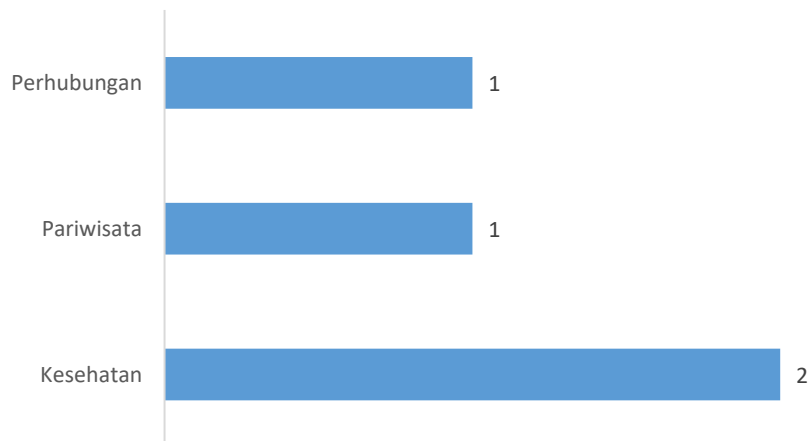
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 18. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Halmahera Selatan

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2021 diinisiasi oleh Kepala Daerah dan OPD, yaitu sejumlah 2 (50%) inovasi diinisiasi Kepala Daerah sementara 2 (50%) lainnya diinisiasi oleh OPD. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN, DPRD, dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

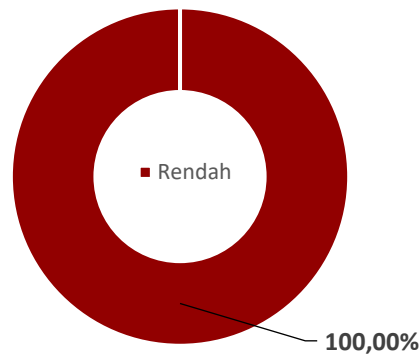
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 19. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Halmahera Selatan

Dari sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan urusan pemerintahan menunjukkan bahwa dari sebaran inovasi daerah tersebut, hanya terdapat 1 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan dengan 1 inovasi, sedangkan untuk urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum dilaporkan.

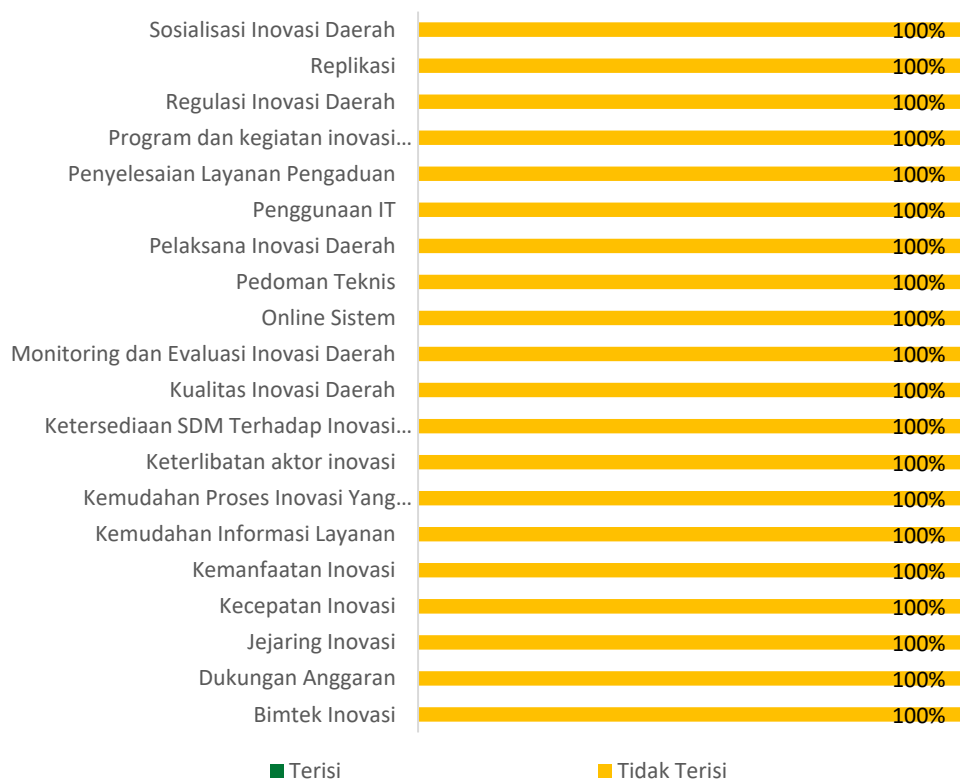
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Halmahera Selatan

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi dengan skor kematangan di bawah 50 (skor kematangan rendah) pada Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 100%, dan tidak ada skor kematangan antara 50 – 100 (skor kematangan sedang) maupun skor kematangan di atas 100 (skor kematangan tinggi), artinya semua inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Selatan memiliki tingkat skor kematangan rendah.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Dari 4 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Selatan, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Selatan tidak dilengkapi dengan data pendukung.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kabupaten Halmahera Selatan

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah diperoleh hasil bahwa indikator dari seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Selatan tidak memiliki tingkat keterisian data pendukung baik di parameter 1, parameter 2 maupun parameter 3.

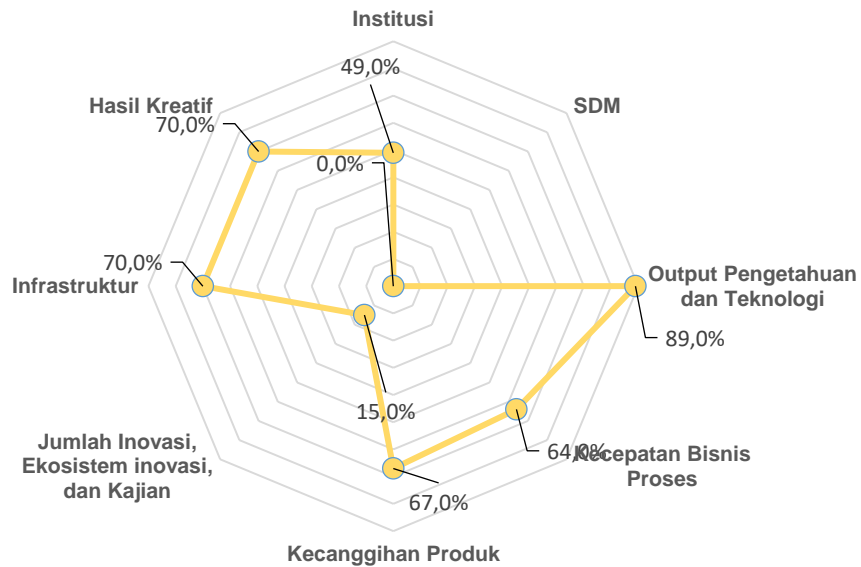
j. Daftar Inovasi Kabupaten Halmahera Selatan beserta Skor Kematangannya

Tabel 3. Daftar Inovasi Kabupaten Halmahera Selatan beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pariwisata	0
Inovasi Daerah Percepatan Covid-19 Pada Sektor Transportasi	0

PAK KADES (PETA KESEHATAN DESA)	0
SAKTI	0

C. KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



Gambar 23. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Halmahera Tengah

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Halmahera Tengah memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi yaitu 89.0%. Artinya secara umum indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel SDM yaitu 0% artinya indikator pada variabel tersebut tidak terisi data pendukung.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

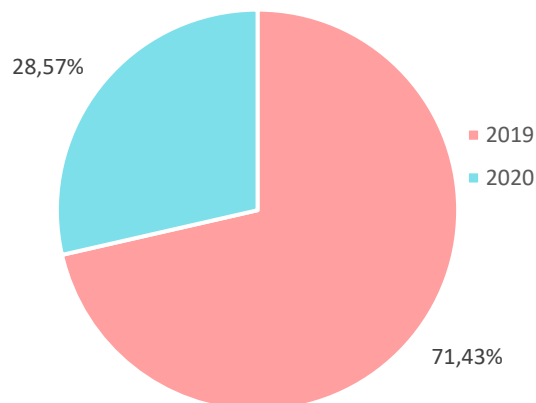
Tingkat Pengangguran Terbuka	0,00
Penurunan Angka Kemiskinan	0,00
Nilai IPM	0,00
Kualitas Peningkatan Perizinan	0,00
Jumlah Peningkatan PAD	0,00
Jumlah Peningkatan Investasi	0,00
Jumlah Pendapatan Perkapita	0,00

Gambar 24. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Halmahera Tengah

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa Aspek Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tidak melakukan pengisian dan tidak ada data pendukung pada seluruh indikator - indikator pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi

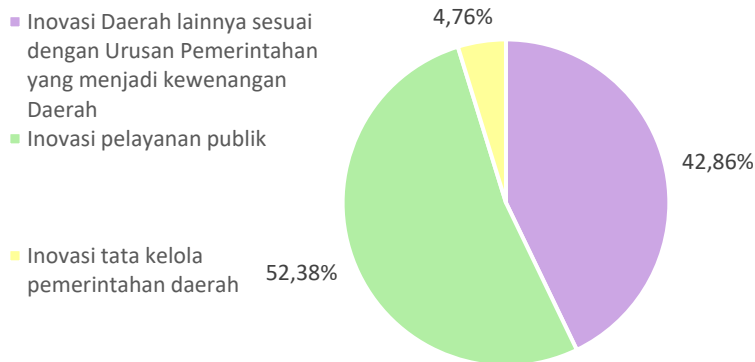


Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Halmahera Tengah

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Tengah telah diterapkan pada tahun 2019. Terdapat 15 (71.43%) inovasi dari

21 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan pada tahun 2019 dan 6 (28.57%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

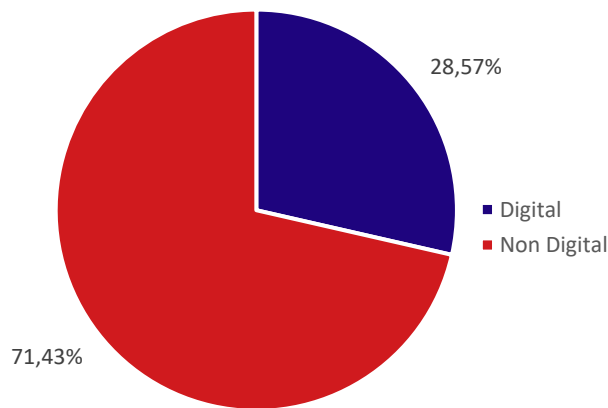
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Halmahera Tengah

Berdasarkan bentuk inovasi terdapat 11 (52.38%) inovasi pelayanan publik dan 9 (42.86%) inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sementara 1 (4.76%) inovasi lainnya adalah inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Tengah merupakan inovasi tata kelola pemerintahan.

c. Berdasarkan Jenis Inovasi

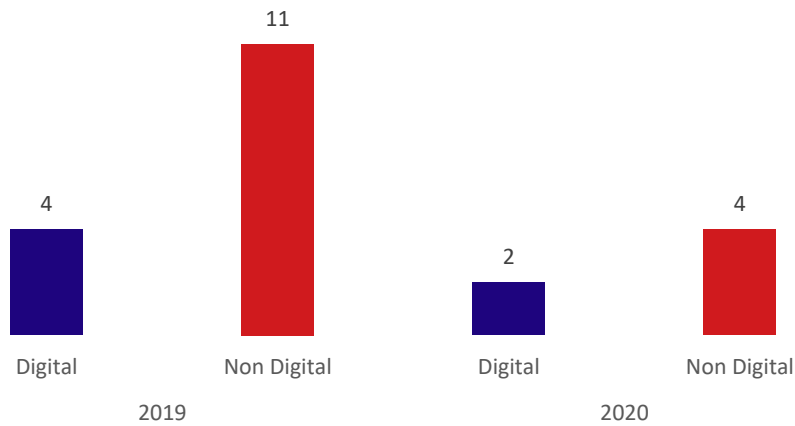


Gambar 27. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan jenis Inovasi pada Kabupaten Halmahera Tengah

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, terdapat 2 jenis inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Tengah yaitu inovasi digital dan inovasi non digital. Mayoritas jenis inovasi yang dilaporkan adalah inovasi non digital

sebesar 71.43% atau 15 inovasi dari 21 inovasi daerah yang dilaporkan dan 28.57% atau 6 inovasi lainnya merupakan inovasi digital.

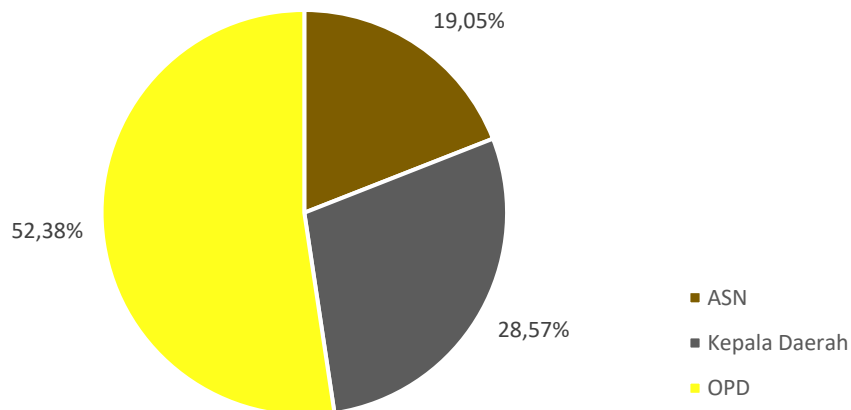
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 28. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Halmahera Tengah

Secara umum jumlah inovasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital mengalami penurunan di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 4 inovasi kemudian pada tahun 2020 menjadi 2 inovasi. Demikian pula dengan inovasi non digital mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 11 inovasi lalu pada tahun 2020 turun menjadi 4 inovasi.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi

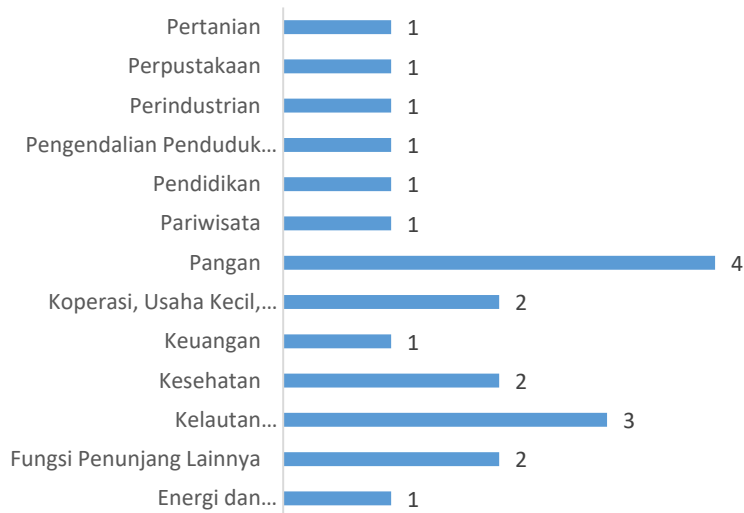


Gambar 29. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Halmahera Tengah

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2021 mayoritas diinisiasi oleh OPD yaitu sejumlah 11 (52.38%) inovasi, sementara 6 (28.57%)

inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah dan 4(19.05%) inovasi lainnya diinisiasi oleh ASN. Untuk inovasi yang diinisiasi DPRD dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

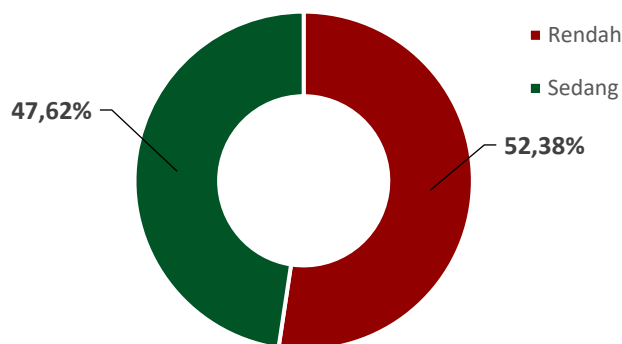
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 30. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Halmahera Tengah

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata yang tersebar di 13 urusan. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan pangan dengan 4 inovasi dari 21 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 2 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan dengan 1 inovasi dan urusan kesehatan dengan 1 inovasi, sementara untuk urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum dilaporkan.

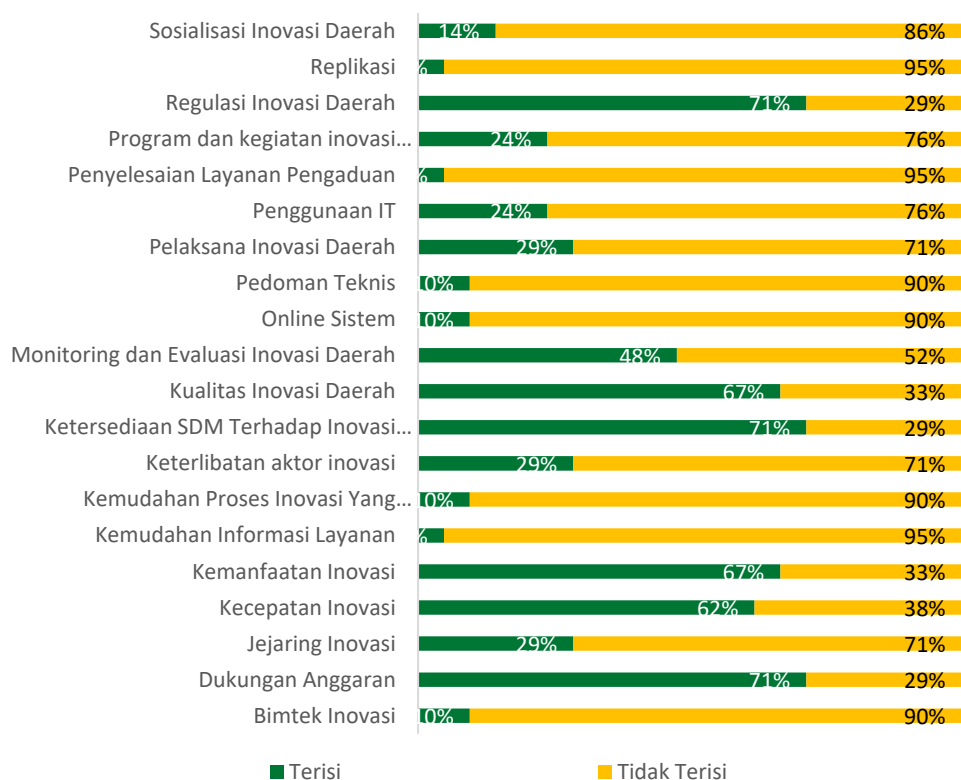
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 31. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Halmahera Tengah

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Tengah mencapai skor kematangan sedang dan rendah, dimana terdapat 11 (52.38%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah dan terdapat 10 (47.62%) inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang. Skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

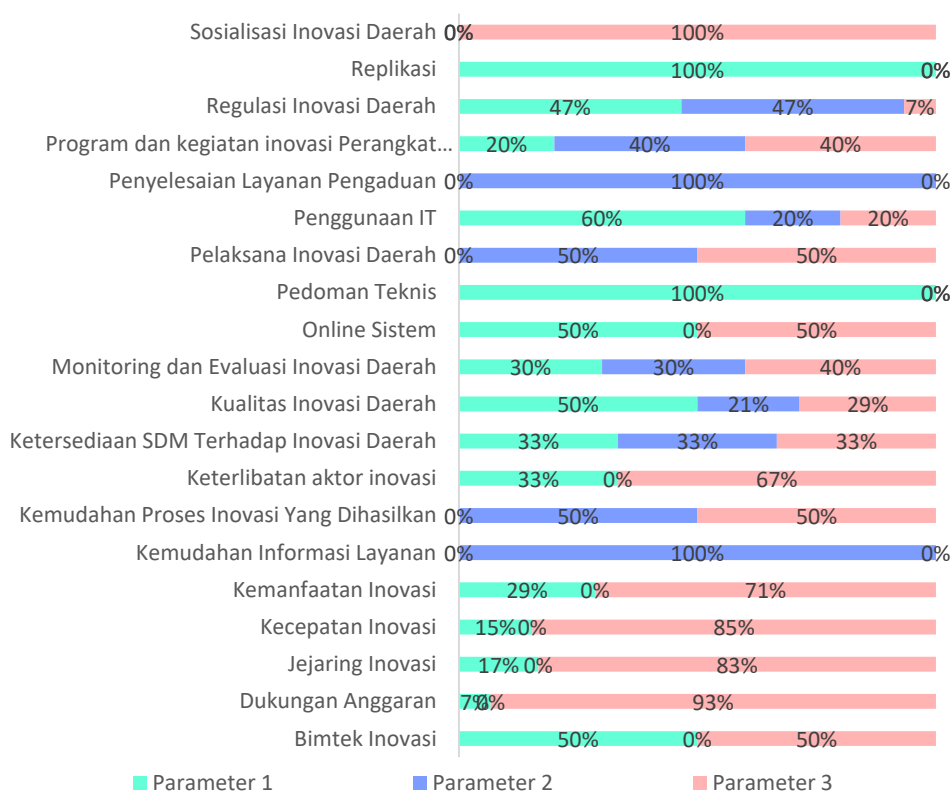


Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Tengah

Dari 21 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Tengah, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 67.14% sedangkan 32.86% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Regulasi Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, dan Dukungan Anggaran merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 71% artinya 15 dari 21 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Tengah telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi, Penyelesaian Layanan Pengaduan, dan Kemudahan Informasi Layanan yaitu sebesar 5% artinya hanya 1

dari 21 inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator - indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 33. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kabupaten Halmahera Tengah

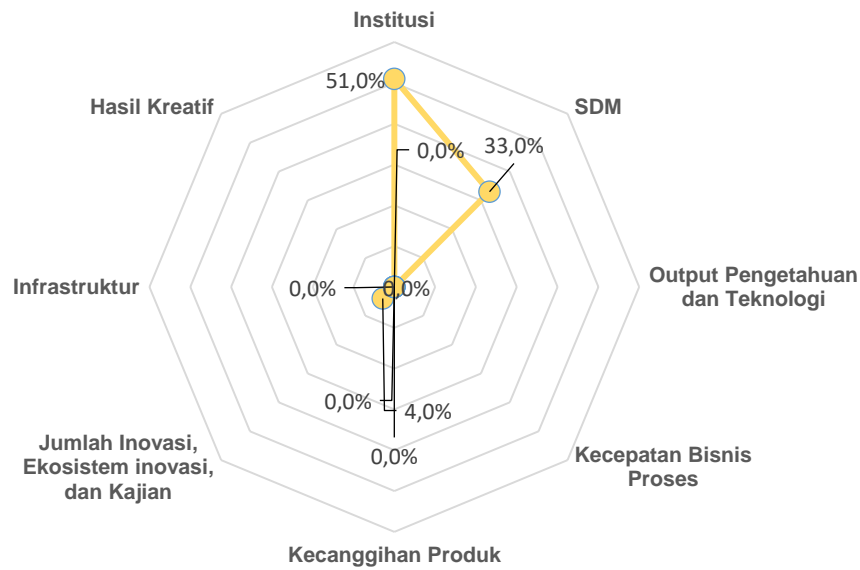
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Kemudahan Informasi Layanan sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Kemudahan Informasi Layanan termasuk dalam kategori parameter kedua. Namun perlu diingat, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa inovasi yang mengisi indikator Kemudahan Informasi Layanan hanya 1 inovasi. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi dan Pedoman Teknis sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Kemudahan Informasi Layanan termasuk dalam kategori parameter pertama, namun perlu diperhatikan juga bahwa inovasi yang mengisi indikator replikasi hanya 1 inovasi.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Halmahera Tengah beserta Skor Kematangannya

Tabel 4. Daftar Inovasi Kabupaten Halmahera Tengah beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Kegiatan Optimasi lahan Pertanian	77
PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP TENAGA PENDAMPING UMKM	73
Kegiatan Inovasi Home Visite	73
BANTUAN MESIN DAN PERALATAN IKM	72
Gerakan Konsumsi Sagu Pengganti Beras	70
Kelompok Usaha Pengolahan Ikan (KUPON) Garampati	64
Koran Masuk Desa	63
Kegiatan Tanggap darurat	63
PEMBERIAN KREDIT KEPADA PELAKU UMKM	62
Nelayan Berdaya Mina Poton	51
Bantuan Studi	48
BarondaHalteng	41
Gerakan Diversifikasi Pangan	35
Manajemen Penyuluhan dan Penggerakan di kampung KB Berbasis Website	34
Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	33
SISMIOP (Sim PBB-P2 Dan Sim BPHTB)	33
Festival Pangan Lokal Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	25
PELAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING KECAMATAN	0
KARTU PENGGUNA SUBSIDI BBM	0
Strategi Pemberdayaan Nelayan Kecil melalui Modernisasi Armada Tangkap di Kabupaten Halmahera Tengah	0
Efektifitas Notulensi Melalui Penyiapan SDM Pengelola Aplikasi Rekaman Suara di Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah	0

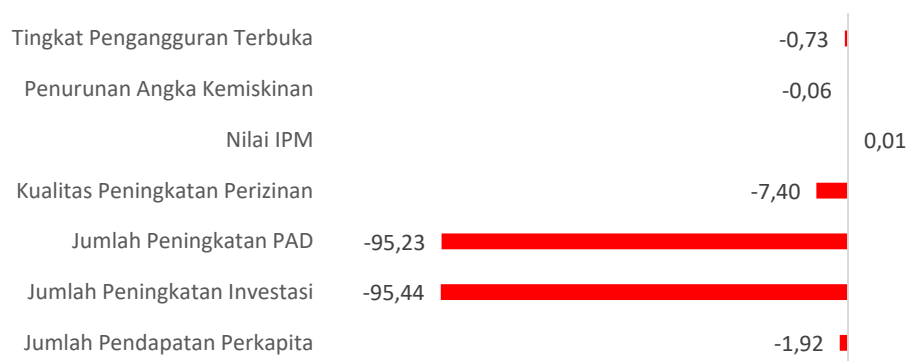
D. KABUPATEN HALMAHERA TIMUR



Gambar 34. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Halmahera Timur

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Halmahera Timur memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi yaitu 51.0%. Artinya secara umum indikator pada variabel Institusi memiliki skor yang mendekati skor parameter 2. Mayoritas variabel indeks inovasi daerah pada Kabupaten Halmahera Timur memiliki skor 0% yaitu indikator Hasil Kreatif, Infrastruktur, Kecanggihan Produk, Kecepatan Bisnis Proses, Output Pengetahuan dan Teknologi. Artinya indikator – indikator pada variabel – variabel tersebut tidak terisi data pendukung.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 35. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Halmahera Timur

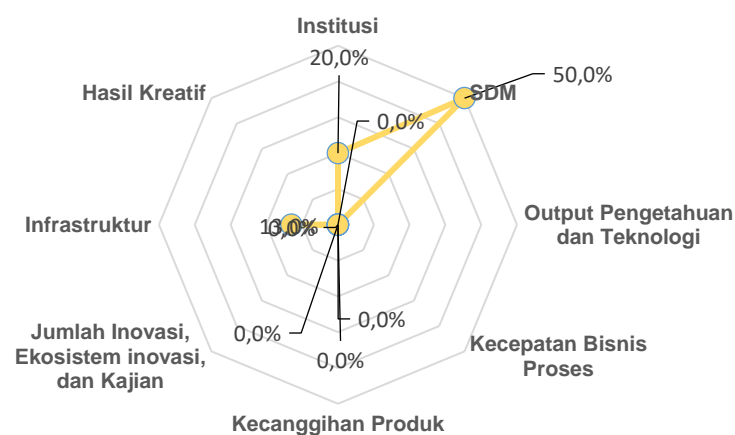
Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Halmahera Timur belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.73%, artinya jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2020 naik sebesar 0.73% dibandingkan dengan tahun 2019. Dimana nilai pada indikator tersebut belum sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya jumlah pengangguran terbuka hanya naik sebesar 0.92%. Selanjutnya, indikator angka kemiskinan mengalami juga menunjukkan penurunan sebesar 0.06%, artinya jumlah penduduk miskin pada Kabupaten Halmahera Timur bertambah sebesar 0.06% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana nilai pada indikator tersebut juga belum sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya jumlah penduduk miskin turun sebesar 0.02%.

Indikator IPM menunjukkan peningkatan sebesar 0.01% dimana nilai tersebut sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Kualitas Peningkatan Perizinan pada Kabupaten Halmahera Timur mengalami penurunan sebesar 7.40% nilai tersebut cukup jauh dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%. Jumlah Peningkatan PAD juga mengalami penurunan sebesar 95.23% dimana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 8%. Kabupaten Halmahera Timur juga mengalami penurunan pada Jumlah Investasi sebesar 95.44% dimana nilai tersebut jauh lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya meningkat sebesar 0.45%. Demikian juga dengan Jumlah Pendapatan Perkapita yang turun sebesar 1.92% dimana seharusnya standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan penurunan hanya sebesar 1.85%.

Berdasarkan Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur hanya mengisi Aspek Satuan Pemerintah Daerah saja dan tidak ada inovasi yang dilaporkan pada Aspek Satuan Inovasi Daerah.

E. KABUPATEN HALMAHERA UTARA



Gambar 36. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Halmahera Utara

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Halmahera Utara memiliki skor tertinggi pada variabel SDM yaitu 50.0%. Artinya secara umum indikator pada variabel SDM memiliki skor yang mendekati skor parameter 2. Namun terdapat beberapa variabel yang memiliki skor sebesar 0% yaitu variabel Hasil Kreatif, Output Pengetahuan dan Teknologi, Kecepatan Bisnis Proses, Kecanggihan Produk, Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian. Artinya indikator - indikator pada variabel tersebut tidak terisi data pendukung.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

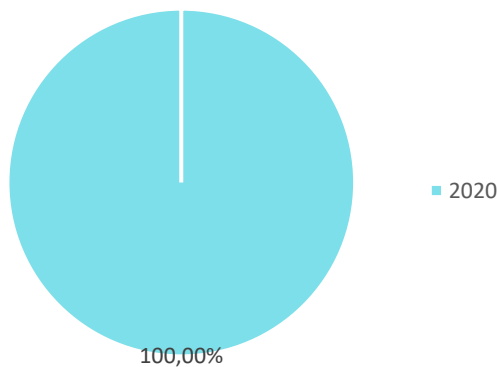


Gambar 37. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Halmahera Utara

Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa data menunjukkan adanya peningkatan pada Jumlah Pendapatan Perkapita sebesar 2.50% dimana nilai tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah dengan batas penurunan sebesar 1.85%. Sedangkan untuk indikator Tingkat Pengguran Terbuka, Penurunan Angka Kemiskinan, Nilai IPM, Kualitas Peningkatan Perizinan, Jumlah Peningkatan PAD, dan Jumlah Peningkatan Investasi menunjukkan bahwa Kabupaten Halmahera Utara tidak melakukan pengisian data pendukung.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

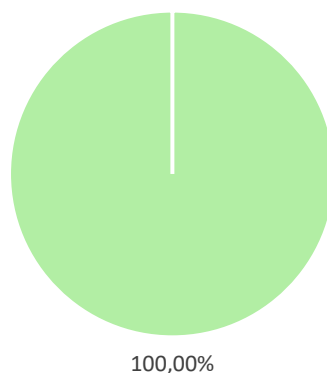
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Halmahera Utara

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, sebesar 100% atau hanya 1 inovasi saja yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Utara diterapkan pada tahun 2020 dan tidak ada inovasi yang dilaporkan pada tahun 2019.

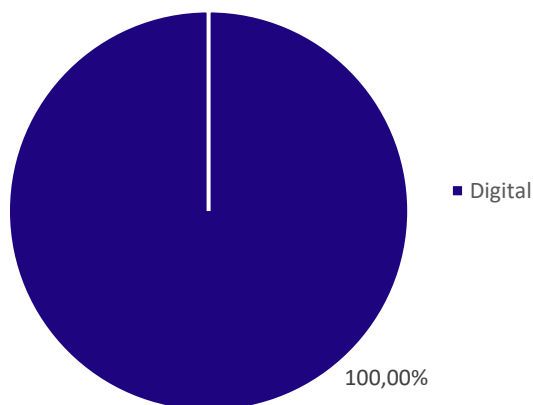
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 39. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Halmahera Utara

Berdasarkan bentuk inovasinya, inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Utara merupakan inovasi pelayanan publik yaitu sebesar 100% atau hanya 1 inovasi.

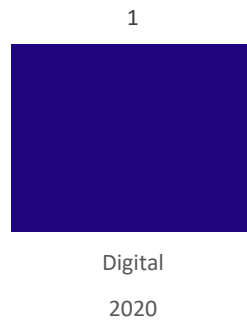
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Halmahera Utara

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat berdasarkan jenis inovasinya, inovasi yang dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara merupakan inovasi Digital.

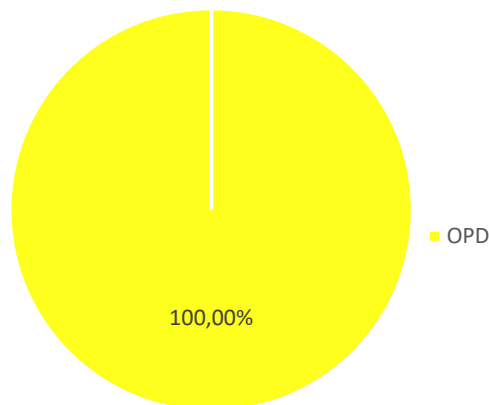
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 41. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Halmahera Utara

Dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara hanya melaporkan 1 inovasi saja dengan jenis inovasi digital yang diterapkan pada tahun 2020.

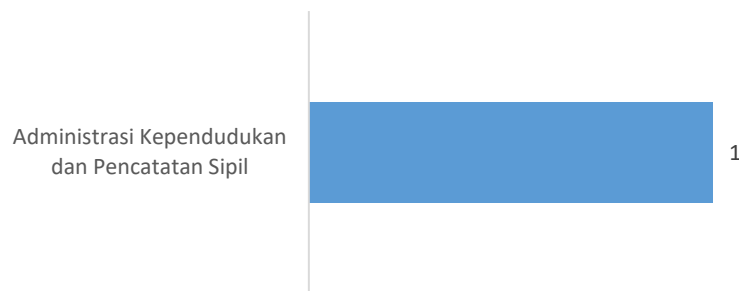
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 42. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Halmahera Utara

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2021 hanya diinisiasi oleh OPD sebesar 100% (1 inovasi).

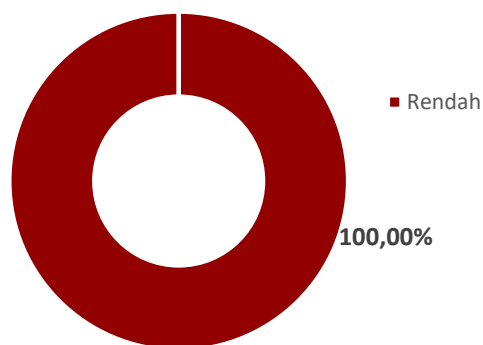
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 43. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Halmahera Utara

Inovasi yang dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara merupakan inovasi dengan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sejumlah 1 inovasi.

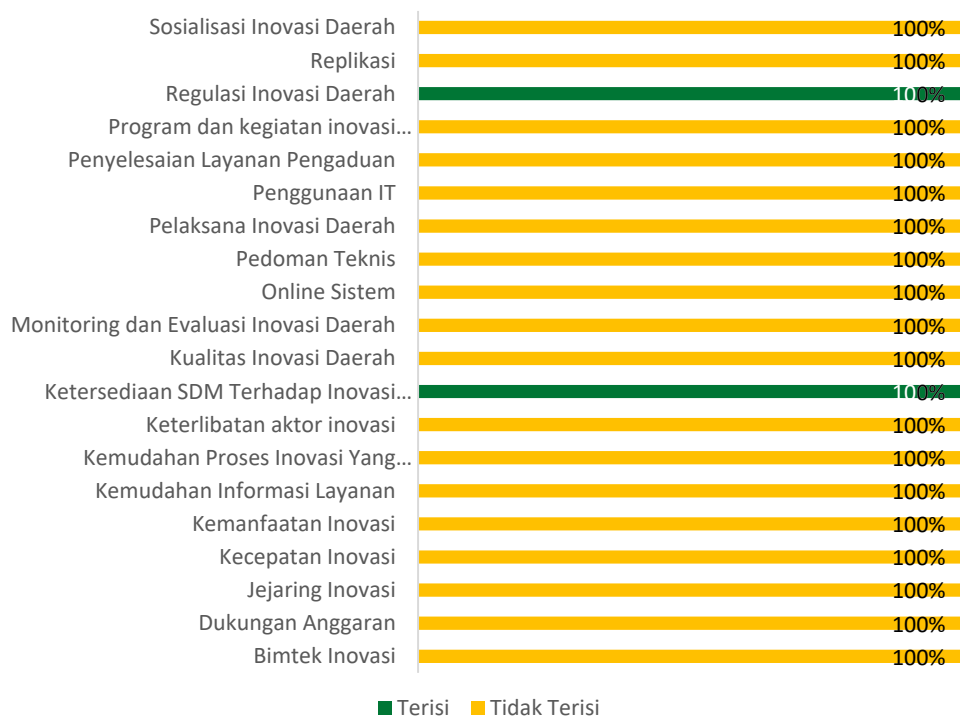
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 44. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Halmahera Utara

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Utara mencapai skor kematangan rendah yaitu skor kematangan dibawah 50.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

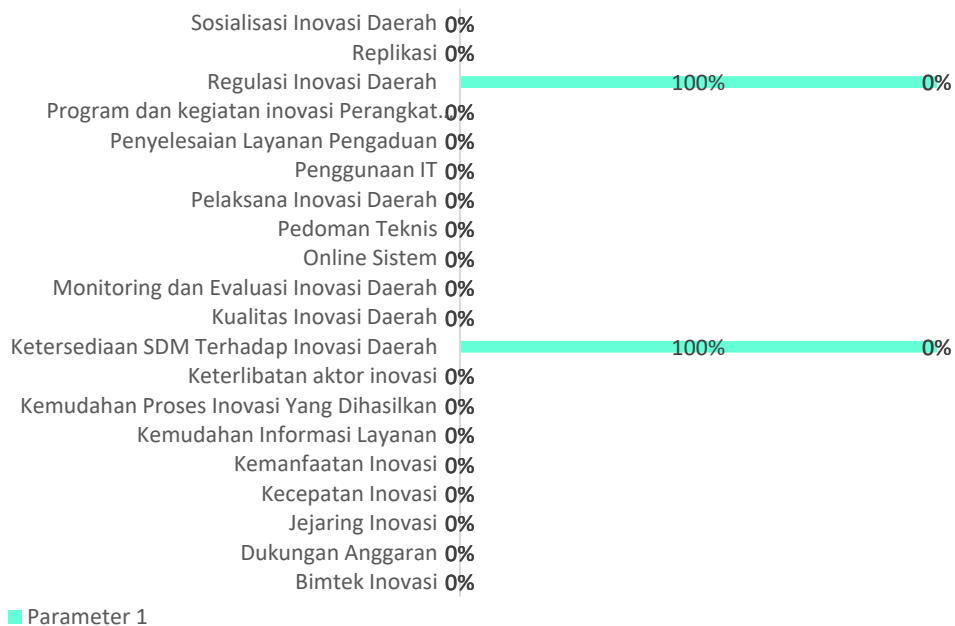


Gambar 45. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Utara

Dari 1 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Utara, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 90%. Sedangkan, 100% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator dari inovasi yang dilaporkan Kabupaten Halmahera Utara yang memiliki tingkat keterisian 100% yaitu Indikator Regulasi Inovasi Daerah dan Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah. Artinya 1 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Utara telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut.

Mayoritas indikator dari inovasi yang dilaporkan Kabupaten Halmahera Utara memiliki tingkat keterisian 0%, yaitu indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Replikasi, Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Penggunaan IT, Pelaksana Inovasi Daerah, Pedoman Teknis, Online Sistem, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, Kemudahan Informasi Layanan, Kemanfaatan Inovasi, Kecepatan Inovasi, Jejaring Inovasi, Dukungan Anggaran dan Bimtek Inovasi. Artinya inovasi yang dilaporkan Kabupaten Halmahera Utara tidak terisi data pendukung dari indikator – indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 46. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kabupaten Halmahera Utara

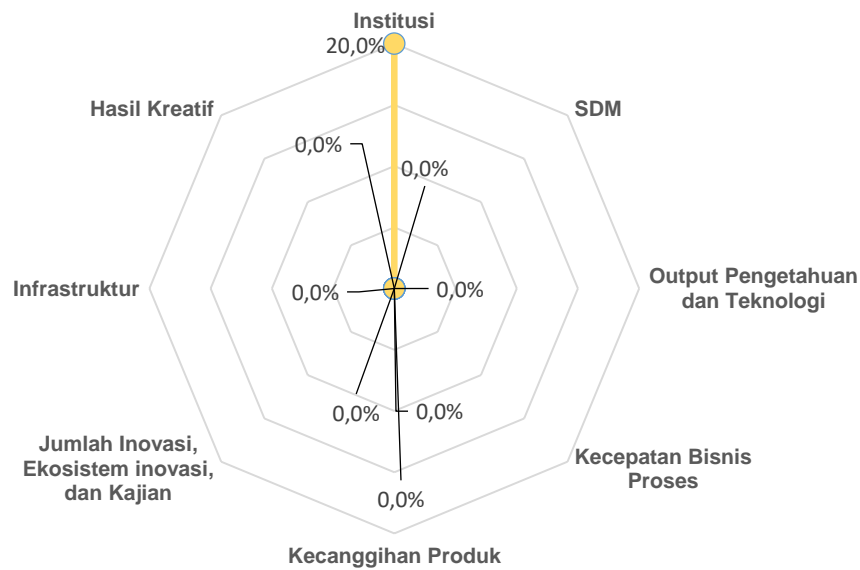
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) sebesar 100% adalah indikator regulasi inovasi daerah, dan ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah. Artinya 1 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Halmahera Utara yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter satu. Sedangkan untuk parameter 2 dan parameter 3 tidak memiliki tingkat keterisian data pendukung.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Halmahera Utara beserta Skor Kematangannya

Tabel 5. Daftar Inovasi Kabupaten Halmahera Utara beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
BAHAGIA (Bayi Lahir Harus Langsung Miliki Akte Lahir)	4

F. KABUPATEN KEPULAUAN SULA



Gambar 47. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kepulauan Sula

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Kepulauan Sula memiliki skor yang masih cukup rendah pada variabel Institusi yaitu 20,0%. Artinya secara umum indikator pada variabel Institusi memiliki skor yang mendekati skor parameter 1. Mayoritas variabel indeks inovasi daerah pada kabupaten Kepulauan Sula memiliki skor sebesar 0%, yaitu variabel SDM, Hasil Kreatif, Output Pengetahuan dan Teknologi, Kecepatan Bisnis Proses, Kecanggihan Produk, Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian, dan Infrastruktur. Artinya indikator - indikator pada variabel tersebut tidak terisi data pendukung.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

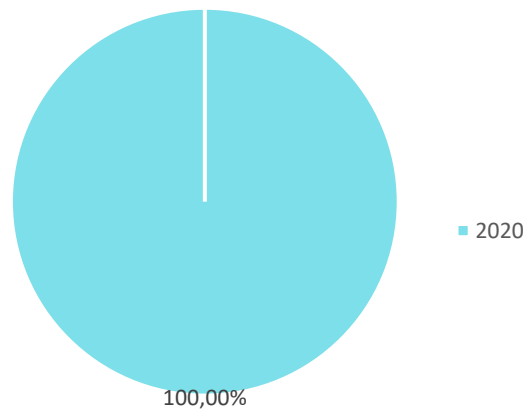
Tingkat Pengangguran Terbuka	0,00
Penurunan Angka Kemiskinan	0,00
Nilai IPM	0,00
Kualitas Peningkatan Perizinan	0,00
Jumlah Peningkatan PAD	0,00
Jumlah Peningkatan Investasi	0,00
Jumlah Pendapatan Perkapita	0,00

Gambar 48. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kepulauan Sula

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Kepulauan Sula tidak melakukan pengisian pada seluruh indikator - indikator pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

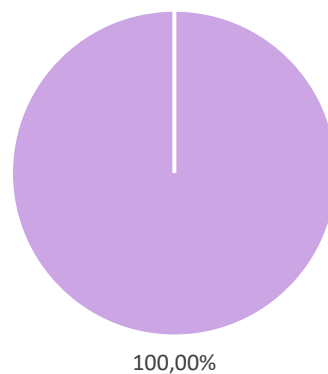
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 49. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kepulauan Sula

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, sebesar 100% atau hanya 1 inovasi saja yang dilaporkan oleh Kabupaten Kepulauan Sula diterapkan pada tahun 2020 dan tidak ada inovasi yang dilaporkan pada tahun 2019.

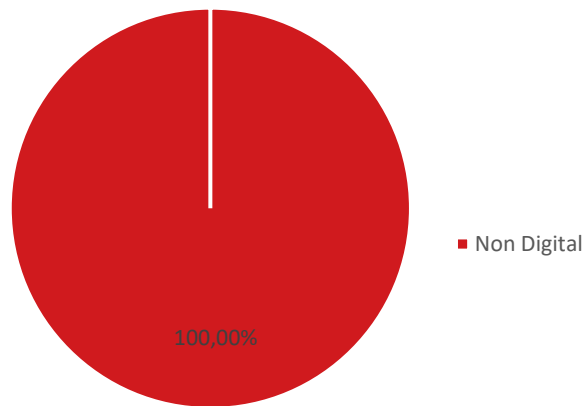
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 50. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kepulauan Sula

Berdasarkan bentuk inovasinya, inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Kepulauan Sula merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu sebesar 100% atau hanya 1 inovasi.

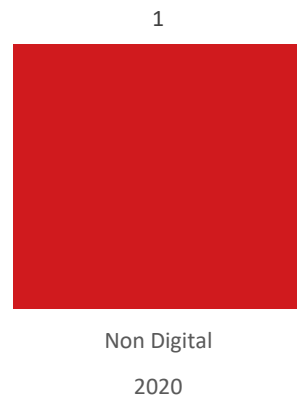
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kepulauan Sula

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat berdasarkan jenis inovasinya, inovasi yang dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula merupakan inovasi Non Digital.

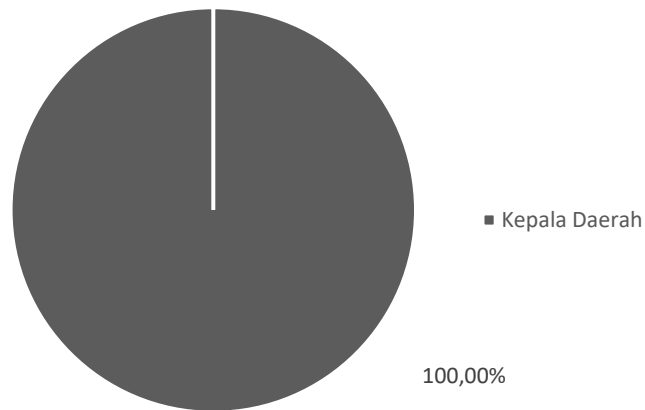
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 52. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kepulauan Sula

Dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula hanya melaporkan 1 inovasi saja dengan jenis inovasi non digital yang diterapkan pada tahun 2020.

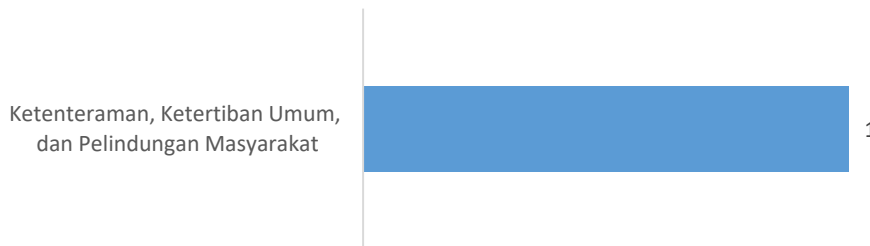
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 53. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Kepulauan Sula

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2021 diinisiasi oleh Kepala Daerah sebesar 100% (1 inovasi).

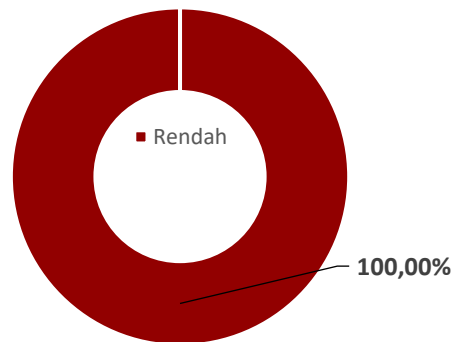
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 54. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kepulauan Sula

Inovasi yang dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula merupakan salah satu inovasi urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sejumlah 1 inovasi.

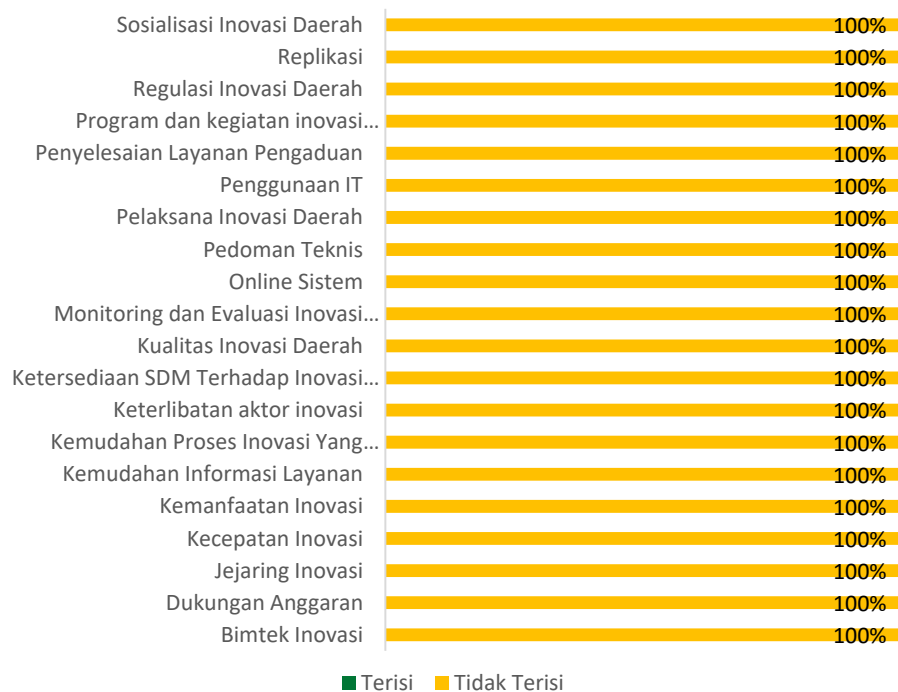
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 55. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kepulauan Sula

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kepulauan Sula mencapai skor kematangan rendah yaitu skor kematangan dibawah 50.

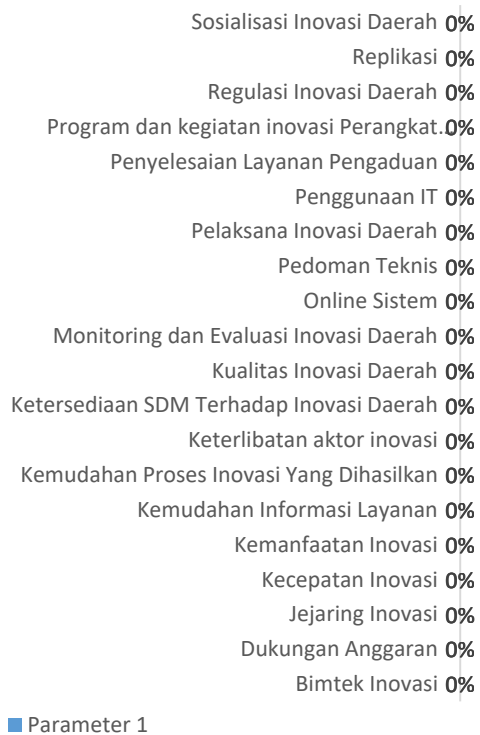
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 56. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula

Dari 1 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kepulauan Sula, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 100% sedangkan 0% lainnya telah terisi data pendukung. Artinya seluruh indikator satuan inovasi daerah dari 1 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kepulauan Sula tidak terisi data pendukung.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 57. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kabupaten Kepulauan Sula

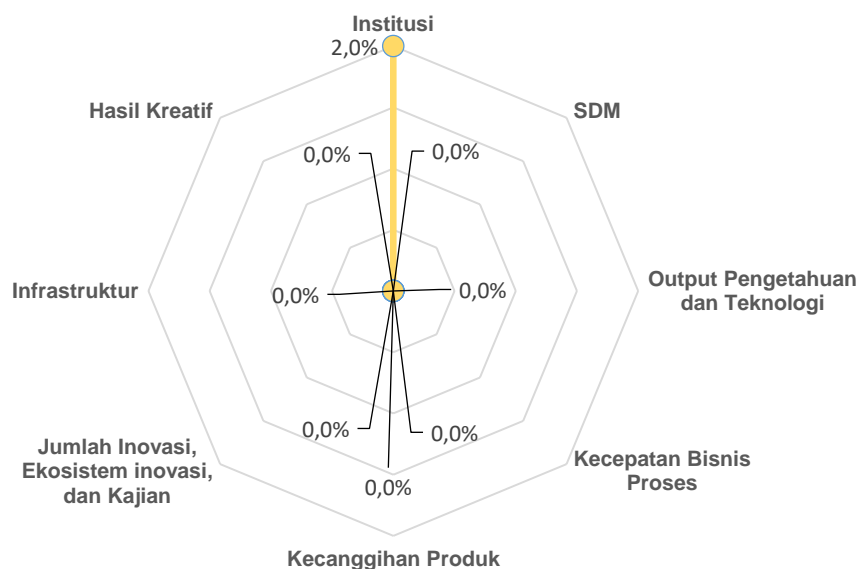
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah diperoleh hasil bahwa indikator dari seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kepulauan Sula tidak memiliki tingkat keterisian data pendukung baik di parameter 1, parameter 2 maupun parameter 3.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Kepulauan Sula beserta Skor Kematangannya

Tabel 6. Daftar Inovasi Kabupaten Kepulauan Sula beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
MALOM KUB-KEARIFAN LOKAL MENUJU NEW NORMAL	0

G. KABUPATEN PULAU TALIBU



Gambar 58. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Pulau Talibu

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Pulau Talibu memiliki pada variabel Institusi yaitu 2.0%. Artinya secara umum indikator pada variabel Institusi memiliki skor pada parameter 1. Mayoritas variabel indeks inovasi daerah pada Kabupaten Pulau Talibu memiliki skor 0%, yaitu variabel SDM, Hasil Kreatif, Output Pengetahuan dan Teknologi, Kecepatan Bisnis Proses, Kecanggihan Produk, Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian, dan Infrastruktur. Artinya indikator - indikator pada variabel tersebut tidak terisi data pendukung.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

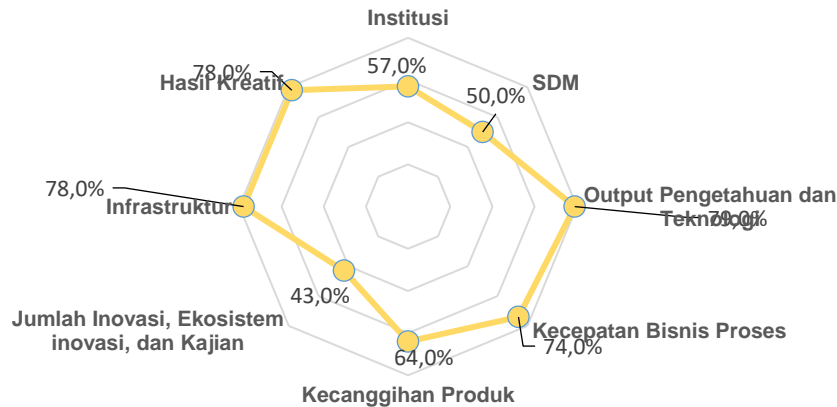
Tingkat Pengangguran Terbuka	0,00
Penurunan Angka Kemiskinan	0,00
Nilai IPM	0,00
Kualitas Peningkatan Perizinan	0,00
Jumlah Peningkatan PAD	0,00
Jumlah Peningkatan Investasi	0,00
Jumlah Pendapatan Perkapita	0,00

Gambar 59. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Pulau Talibu

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah

Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Pulau Talibu tidak melakukan pengisian pada seluruh indikator - indikator pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 tersebut tidak ada inovasi yang dilaporkan pada Aspek Satuan Inovasi Daerah.

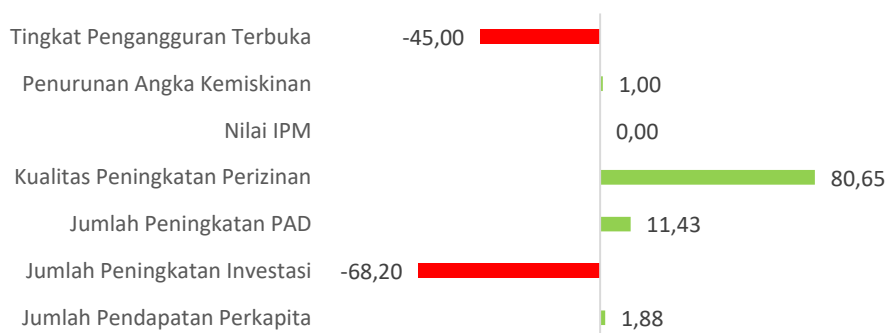
H. KABUPATEN PULAU MOROTAI



Gambar 60. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Pulau Morotai

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, mayoritas variabel indeks inovasi daerah Kabupaten Pulau Morotai memiliki skor yang mendekati parameter 2. Skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, yaitu 79.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3), sedangkan skor terendah adalah variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian, yaitu 43.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut mendekati pada parameter 2.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 61. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Pulau Morotai

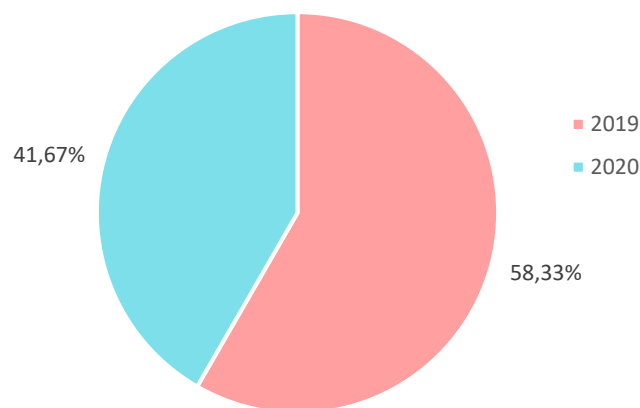
Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kepulauan Morotai terjadi perkembangan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 45%, artinya jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2020 meningkat 45% dibandingkan dengan tahun 2019. Dimana nilai pada indikator tersebut belum sesuai dan memiliki selisih yang cukup jauh dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya jumlah pengangguran terbuka hanya naik sebesar 0.92%. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan meningkat sebesar 1%, artinya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pulau Morotai turun 1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana nilai pada indikator tersebut sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah.

Indikator Nilai IPM menunjukkan angka sebesar 0% artinya tidak terjadi perubahan atau tetap. Kemudian indikator Kualitas Peningkatan Perijinan juga menunjukkan peningkatan sebesar 80.65% dimana nilai tersebut juga sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 5%. Demikian juga dengan Jumlah Peningkatan PAD yang meningkat sebesar 11.43% dimana nilai tersebut lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 8%.

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai mengalami penurunan pada Jumlah peningkatan Investasi sebesar 68.20% dimana nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 0.45%. Sedangkan Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kabupaten Pulau Morotai menunjukkan kenaikan sebesar 1.88% nilai tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah dengan batas penurunan sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi

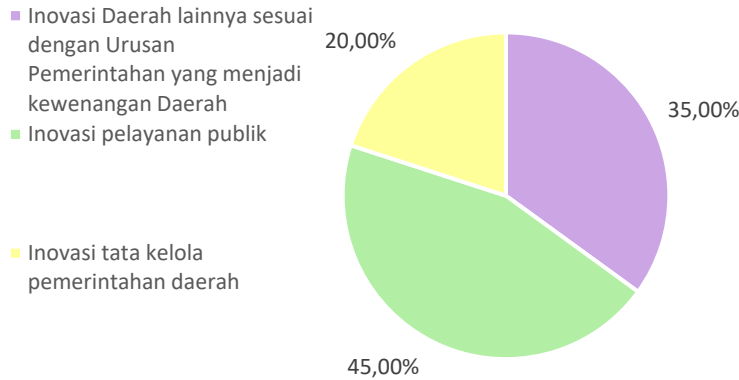


Gambar 62. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Pulau Morotai

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pulau Morotai telah diterapkan pada tahun 2019. Terdapat 35 (58.33%) inovasi dari 60

inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan pada tahun 2019 dan 25 (42.67%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

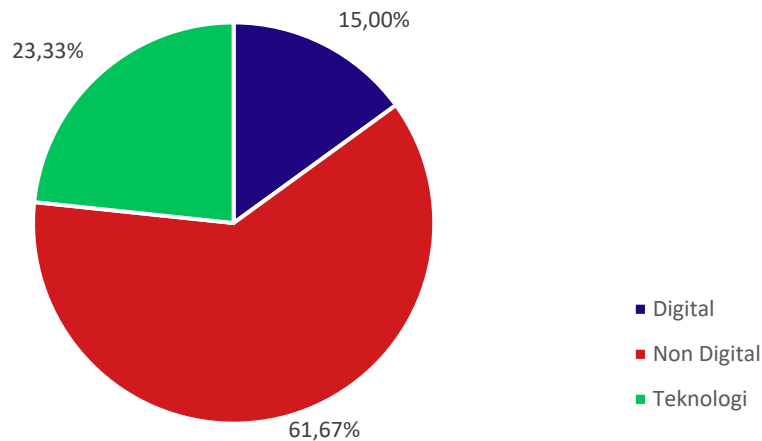
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 63. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Pulau Morotai

Berdasarkan bentuk inovasi terdapat 27 (45%) inovasi pelayanan publik dan 21 (35%) inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sementara 12 (20%) inovasi lainnya adalah inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Pulau Morotai merupakan inovasi tata kelola pemerintahan.

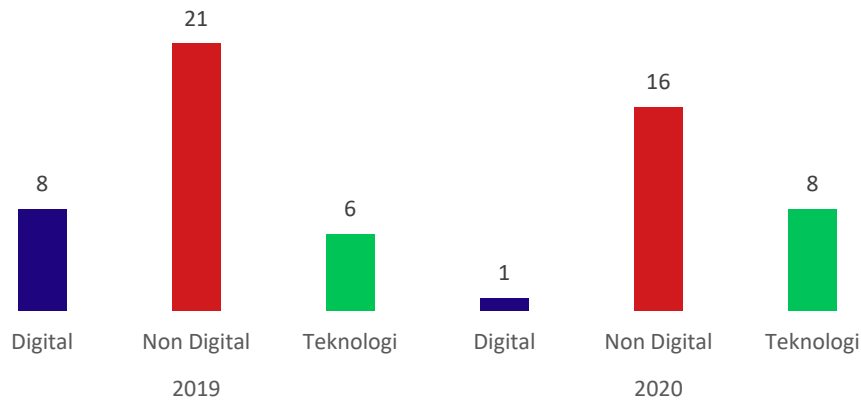
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 64. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Pulau Morotai

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 37 (61.67%) dari 60 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Pulau Morotai merupakan inovasi non digital, kemudian 14 (23.33%) inovasi merupakan inovasi teknologi, dan 9 (15%) inovasi lainnya merupakan inovasi digital.

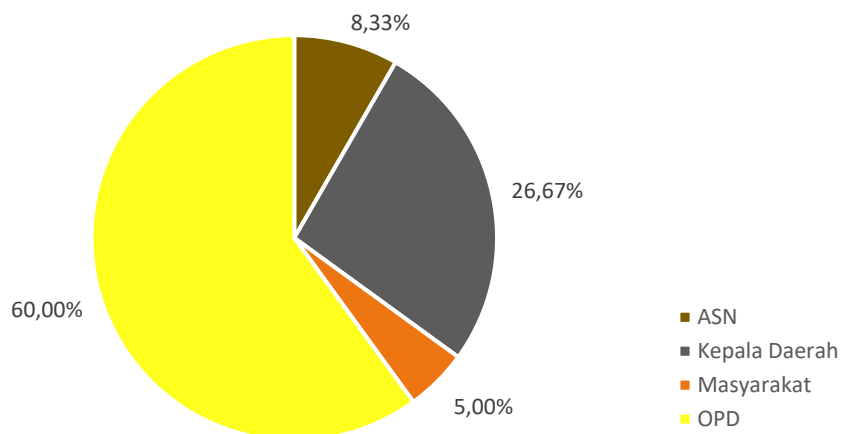
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 65. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Pulau Morotai

Secara umum jumlah inovasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital, sedangkan inovasi teknologi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Dapat dilihat bahwa inovasi digital menurun di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 8 inovasi namun pada tahun 2020 turun menjadi 1 inovasi. Demikian pula dengan inovasi non digital mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 21 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 16 inovasi. Namun inovasi teknologi mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 6 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 8 inovasi teknologi.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi

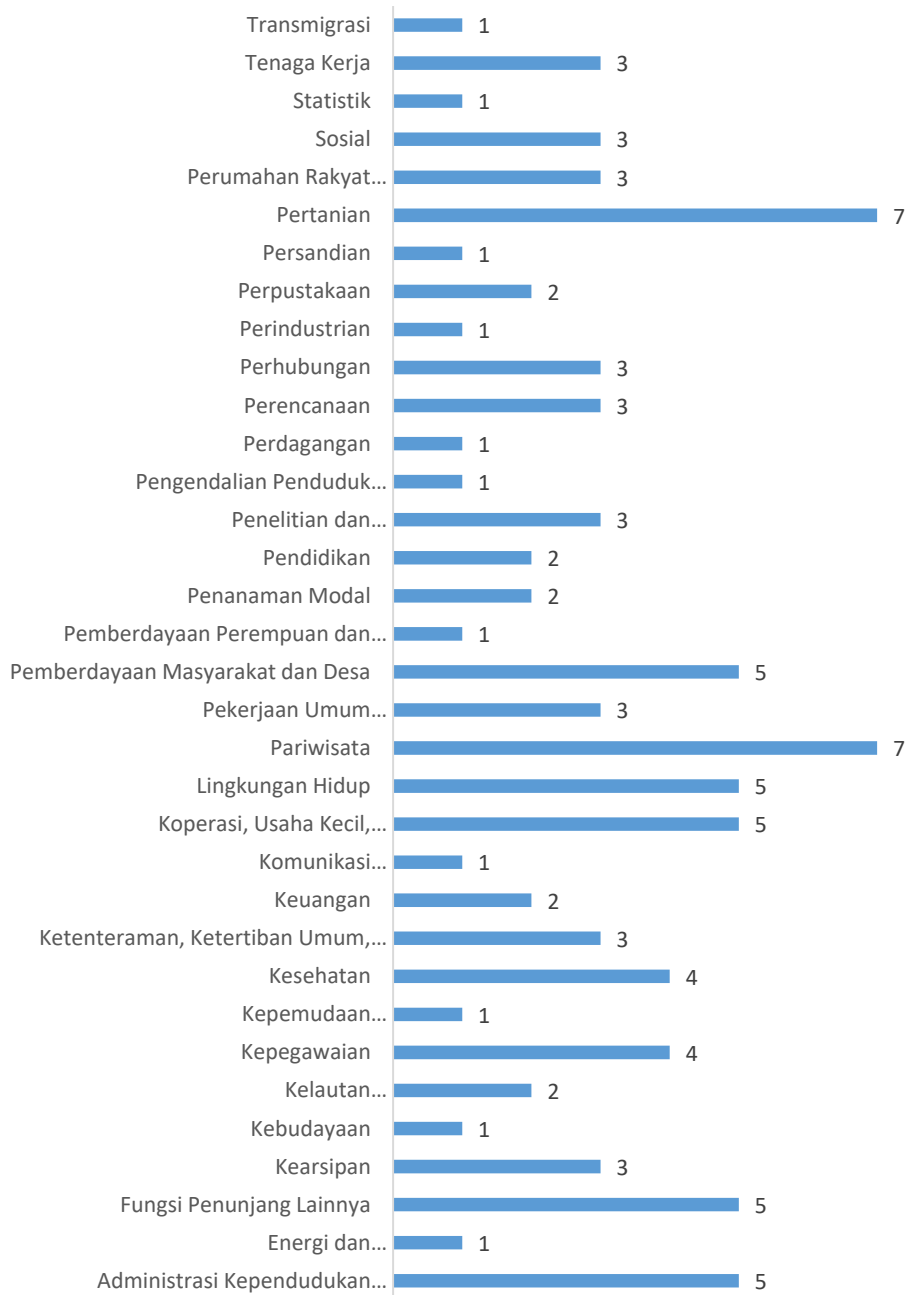


Gambar 66. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Pulau Morotai

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2021 diinisiasi oleh OPD, yaitu sejumlah 36 (60%) inovasi sementara 16 (26.67%) inovasi

diinisiasi oleh Kepala Daerah, 5 (8.33%) inovasi diinisiasi oleh ASN, dan 3 (5%) inovasi lainnya diinisiasi oleh Masyarakat.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

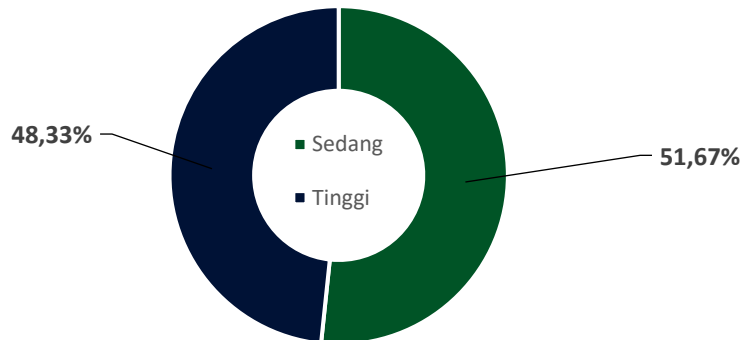


Gambar 67. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Pulau Morotai

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata yang tersebar di 34 urusan. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan pertanian dan urusan pariwisata dengan 7 inovasi dari 60 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat seluruh urusan wajib pelayanan dasar yaitu

urusan pendidikan dengan 2 inovasi, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan 3 inovasi, urusan kesehatan dengan 4 inovasi, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan 3 inovasi, urusan sosial dengan 3 inovasi serta urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dengan 3 inovasi.

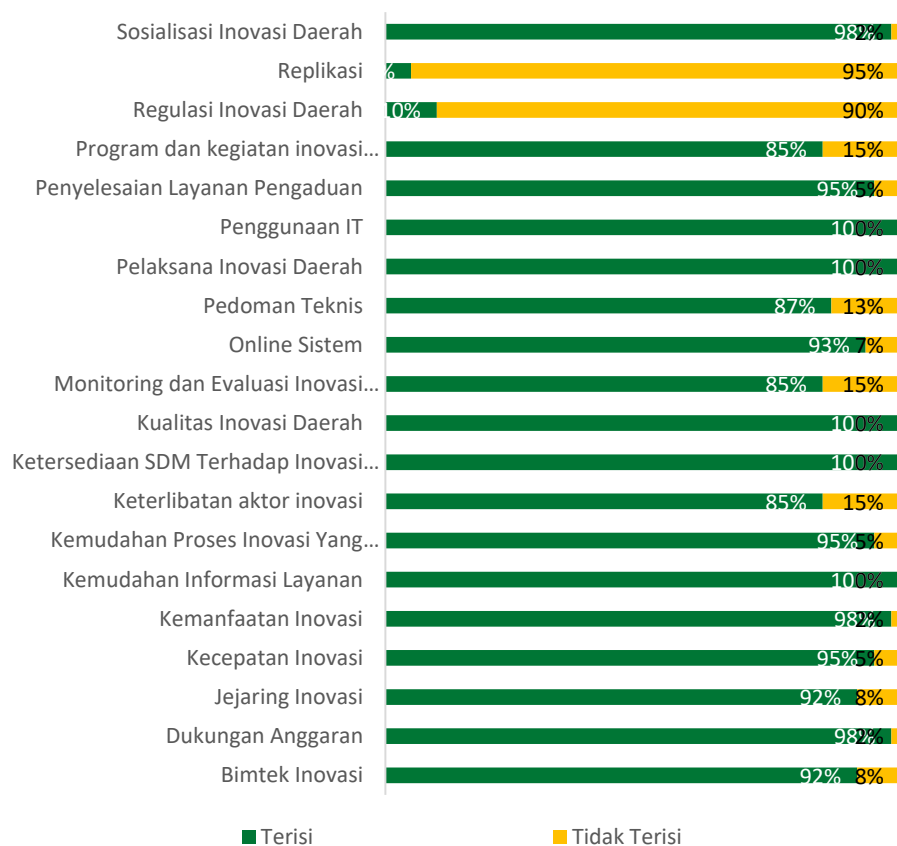
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 68. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Pulau Morotai

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang dan tinggi, dimana terdapat 31 (51.67%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang dan terdapat 29 (48.33%) inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi. Skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

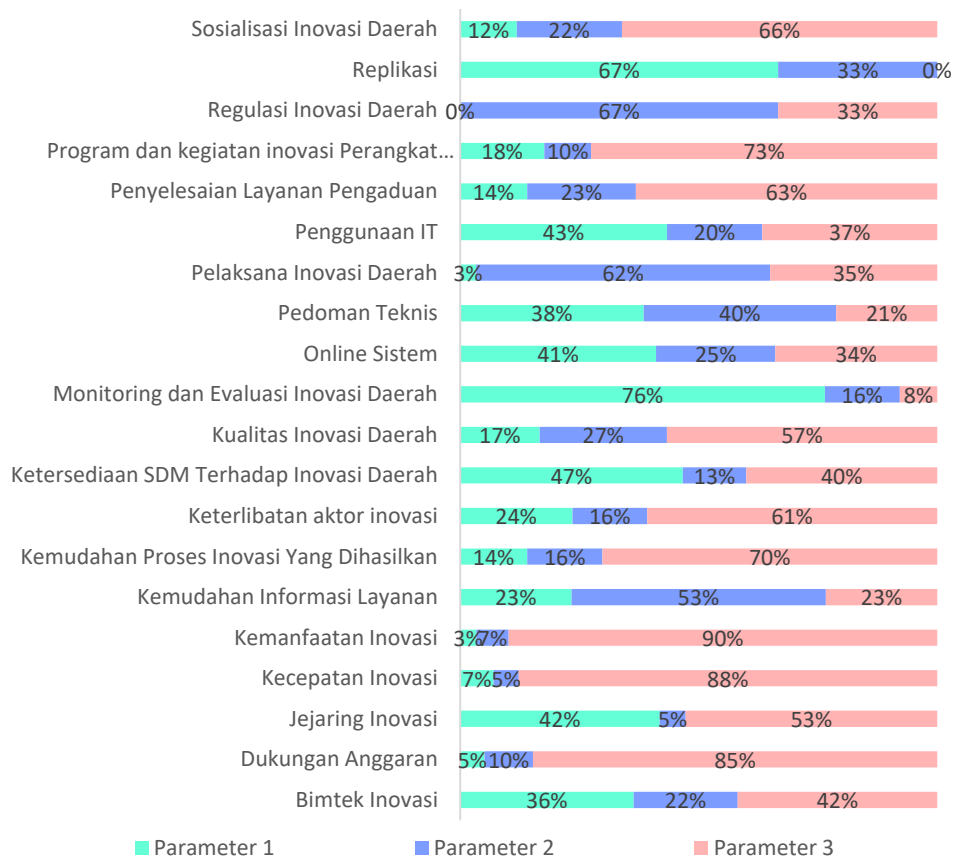
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 69. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pulau Morotai

Dari 60 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pulau Morotai, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 14.33% sedangkan 85.67% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Penggunaan IT, Pelaksana Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, dan Kemudahan Informasi Layanan merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pulau Morotai telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi, yaitu sebesar 5% artinya hanya 3 dari 60 inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 70. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kabupaten Pulau Morotai

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Kemanfaatan Inovasi sebesar 90%, artinya 90% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Kemanfaatan Inovasi termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah sebesar 67%, artinya 67% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Regulasi Inovasi termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah sebesar 76% artinya 76% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Pulau Morotai beserta Skor Kematangannya

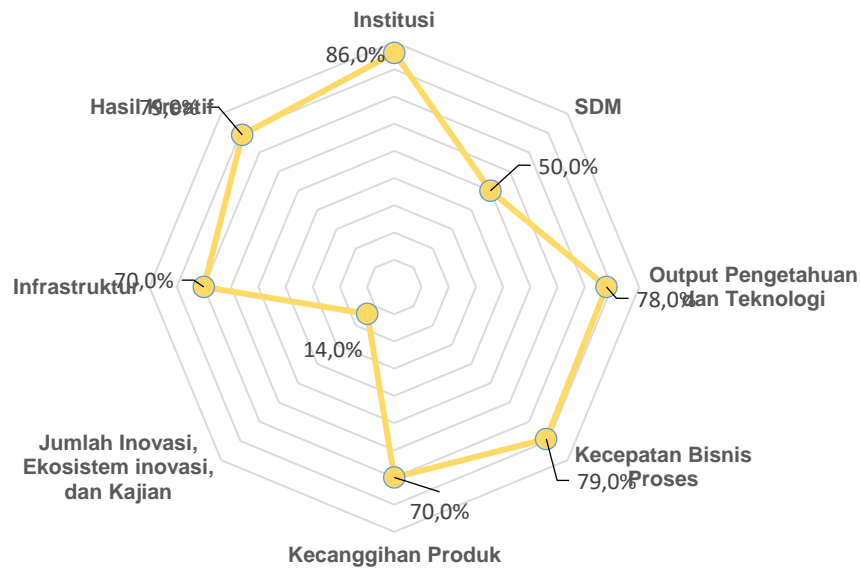
Tabel 7. Daftar Inovasi Kabupaten Pulau Morotai beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Command Center	123
SALTING (Smart Digital Monitoring)	122

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
BERDASI (Sumber Data Berbasis Aplikasi)	118
POJOK KOPI (POJOK - KOORDINASI DAN PENGAWASAN INTERN)	115
GOSOLA (Gososo Soki Galo-Galo)	115
Ikan Garam Ragam Rasa (IGA KERAMAS)	115
BAPERAN	110
INOVASI GEBSAM (Gerakan Benahi Sanitasi Berbasis Masyarakat)	109
SEMEDI	109
LAJU KE-SEKOLAH GRATIS	109
SANITISER (Santunan Tiga Serangkai)	109
Mama Santai di Dapur	109
BALAP (Bantuan Pengolahan Lahan Pertanian)	108
Inovasi Dodola Water Sport	108
Kampung Berseri	107
Morotai Hijau	107
HARUM APERMAZTA (HARI-HARI UNTUK MELAYANI AKTA PERKAWINAN MASUK ZONA WISATA)	106
Perpustakaan Keliling (PUSING)	105
SIKUAT (SISTIM INFORMASI KUNJUNGAN WISATAWAN)	105
BEKAL NASI (BERAS LOKAL TERINTEGRASI)	105
PETA KPK (PENYELESAIAN TEMUAN MELALUI KOMITMEN, PARTISIPASI, KONSELING)	105
DEDETA MORO (DIGITALISASI DESTINASI PARIWISATA)	104
Pelaporan Deteksi Dini di Daerah	103
Bumdes Mart Desa Wayabula Bangkit	103
Inovasi BANGSA Morotai (Bapak Angkat Desa Binaan)	103
INGAT ENAK (Peningkatan SDM Melalui Pelatihan Turunan Ikan)	103
GEMBUR (Gerakan Menanam Buah dan Sayur)	102
Morotai Bersih & Zero Sampah Plastik	101
(PERI HALU BPUM) Penerimaan Izin Usaha Melalui Program BPUM	101
Pengelolaan Cottage	99
Gemari (Gemar Makan Ikan Cegah Stanting)	99
SIMPEG MOROTAI BANGKIT (SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN)	99
Inovasi Tracking Mangrove Dodola	99
Si-MAMAD (Sistem Informasi Manajemen Surat dan Disposisi Online)	99

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Si-RANI (Sistem Informasi Register SPM dan SP2D)	99
PELAYAN SURGA (PENINGKATAN PELAYANAN SESAMA ANTAR UMAT BERAGAMA)	99
NASEHAT MORO (Layanan Kesehatan Jamaah Haji Gratis Morotai)	98
Ruang Aspirasi	98
Transportasi Khusus Angkutan (TEKAN COVID-19)	98
SIPERKASA(mengatasi masalah Pasca Panen Mendukung Ketahanan Pangan)	97
E-Kinerja	97
PELAPAK "Pendampingan Layanan Prakerja"	96
ASURANSI NELAYAN	95
PARE (PEKARANGAN PANGAN LESTARI)	94
Pelayanan Administrasi Terpadu Ormas dan Izin Rekomendasi Penelitian (PATRIOT)	93
Aplikasi E-absen Online	93
PERUMDUK (Pelayanan dari Rumah Penduduk)	90
Pete Padi (Petani Telepon Penyuluh Datangi)	90
Morotai Terang	90
PACARAN "Pencari Kerja Aman Dan Nyaman "	89
DATAKU (DESA TANGGAP KUSTA)	89
GEMAS MORO (Gerakan Masyarakat Anti Stunting di Morotai)	89
JATI NEGARA (JALAN TANI NAE KADARA)	87
HARUM KIAMAS (HARI-HARI UNTUK MELAYANI KARTU IDENTITAS ANAK MASUK SEKOLAH)	85
Call Center DATEBI	84
JATAH SUAP (JALAN TANAH SUDAH ASPAL)	84
Layanan Angkutan Gratis (LARIS)	80
POSKO PJU	79
PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN ELEKTRONIK" (P D K T MORO)	75
AJI BANGKIT (Antar Jemput Izin)	55

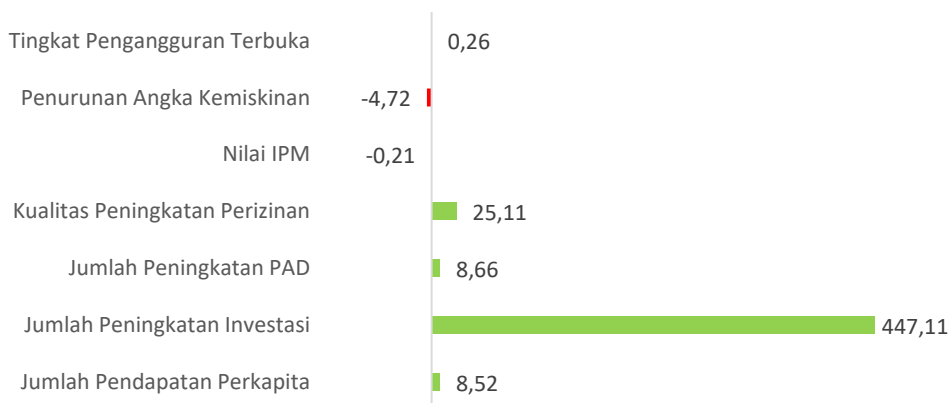
I. KOTA TERNATE



Gambar 71. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Ternate

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Ternate memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 86.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Institusi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 14.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 72. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Ternate

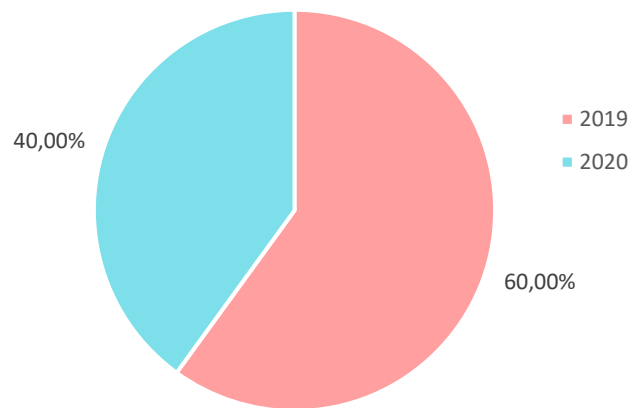
Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Ternate terjadi perkembangan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data

menunjukkan adanya peningkatan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.26%. Artinya jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2020 naik sebesar 0.26% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dimana nilai pada indikator tersebut belum sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya jumlah pengangguran terbuka hanya naik sebesar 0.92%. Selanjutnya, indikator Angka Kemiskinan menurun sebesar 4.72% artinya jumlah penduduk miskin pada Kota Ternate naik sebesar 4.72% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana nilai pada indikator tersebut juga belum sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya jumlah penduduk miskin turun sebesar 0.02%. Demikian juga dengan nilai IPM yang turun sebesar 0.21% dimana nilai tersebut jauh lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap.

Pemerintah Kota Ternate mengalami peningkatan pada Kualitas Peningkatan Perijinan sebesar 25.11% nilai tersebut sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 5%. Jumlah Peningkatan PAD juga meningkat sebesar 8.66% dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah se sebesar 8%. Jumlah Peningkatan Investasi pada Kota Ternate mengalami peningkatan sebesar 447.11% dimana nilai tersebut diatas standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 5%. Demikian juga dengan Jumlah Pendapatan Perkapita yang menunjukkan kenaikan sebesar 8.52% nilai tersebut juga sudah lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah dengan batas penurunan sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 73. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Ternate

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kota Ternate telah diterapkan pada tahun 2019. Terdapat 9 (60%) inovasi dari 15 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan pada tahun 2019 dan 6 (40%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

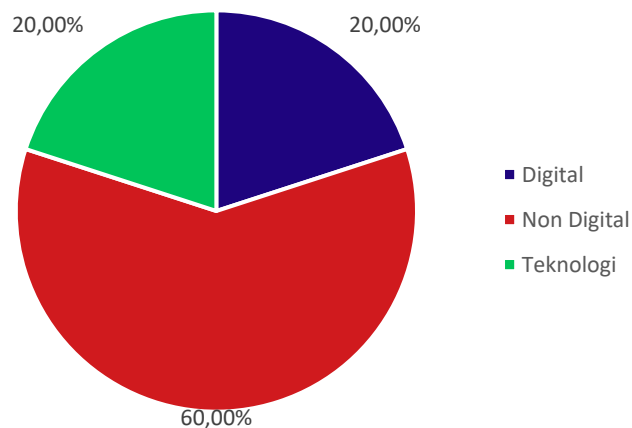
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 74. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Ternate

Berdasarkan bentuk inovasi, hanya terdapat 2 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kota Ternate, yaitu inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sementara inovasi bentuk lainnya belum terlapor. Mayoritas inovasi adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 10 (66.67%) inovasi dan 5 (33.33%) inovasi lainnya adalah inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

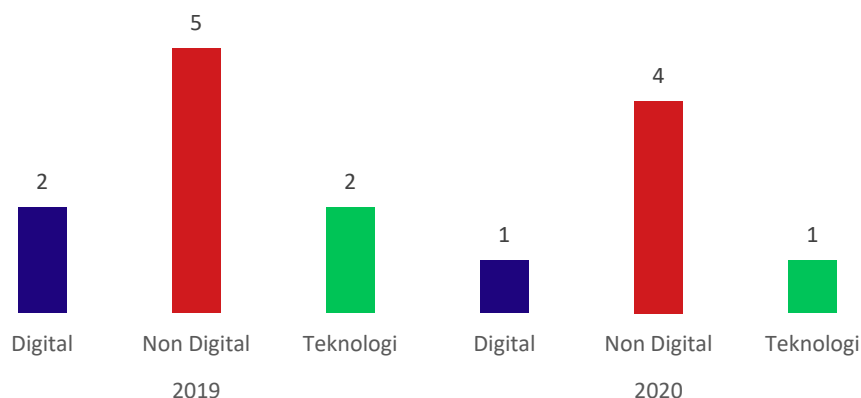
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 75. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Ternate

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 9 (60%) dari 15 inovasi daerah yang dilaporkan Kota Ternate merupakan inovasi non digital, kemudian 3 (20%) inovasi merupakan inovasi digital, dan 3 (20%) inovasi lainnya merupakan inovasi teknologi.

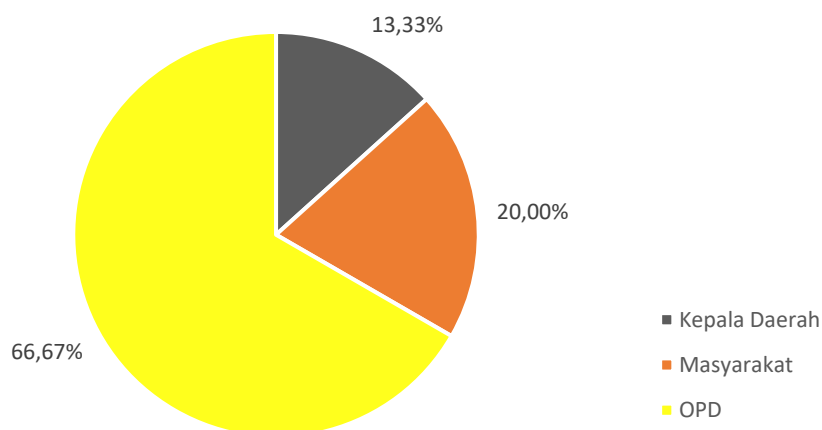
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 76. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Ternate

Secara umum jumlah inovasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital, non digital, maupun teknologi. Dapat dilihat bahwa inovasi digital menurun di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 2 inovasi namun pada tahun 2020 turun menjadi 1 inovasi. Demikian pula dengan inovasi non digital mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 5 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 4 inovasi. Inovasi teknologi mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 2 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 1 inovasi teknologi.

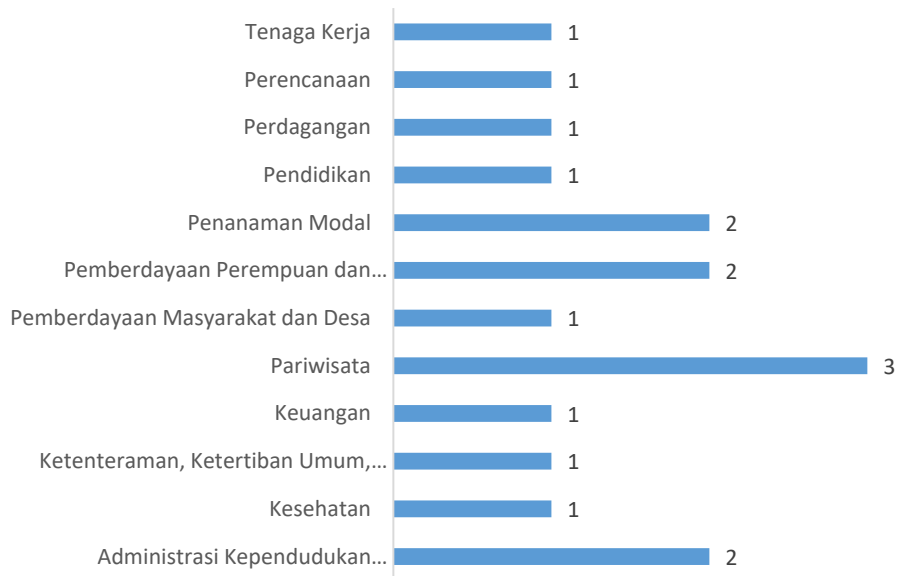
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 77. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Ternate

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Ternate pada tahun 2021 diinisiasi oleh OPD yaitu sejumlah 10 (66.67%) inovasi, sementara 3 (20%) inovasi diinisiasi oleh Masyarakat dan 2 (13.33%) inovasi lainnya diinisiasi oleh Kepala Daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi DPRD dan ASN belum dilaporkan di tahun 2021.

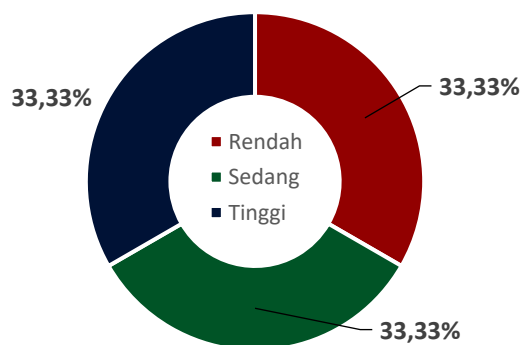
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 78. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Ternate

Sebaran inovasi daerah pada Kota Ternate berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata yang tersebar di 12 urusan. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan pariwisata dengan 3 inovasi dari 15 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 3 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan dengan 1 inovasi, urusan kesehatan dengan 1 inovasi, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dengan 1 inovasi.

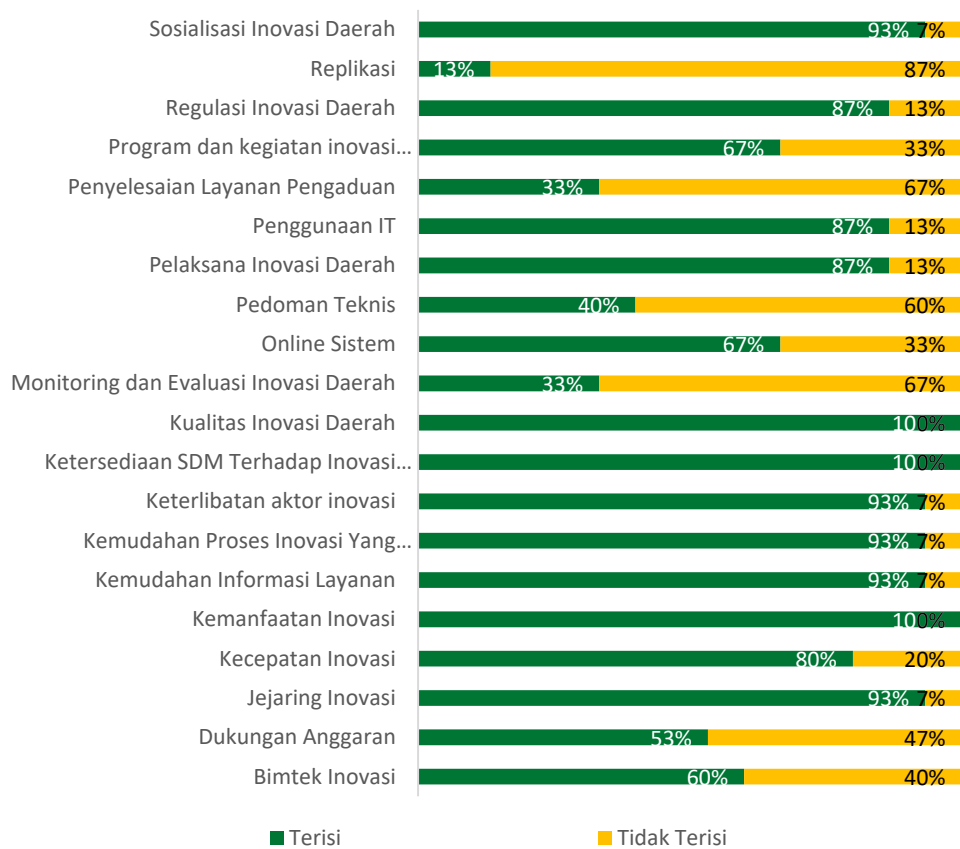
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 79. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Ternate

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, proporsi skor kematangan tinggi, skor kematangan sedang, dan skor kematangan rendah memiliki nilai yang seimbang. Inovasi yang sudah mencapai skor kematangan tinggi, yaitu sejumlah 5 (33.33%) inovasi. Selain itu, terdapat 5 (33.33%) inovasi yang sudah mencapai skor kematangan sedang dan 5 (33.33%) inovasi lainnya memiliki skor kematangan rendah. Skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

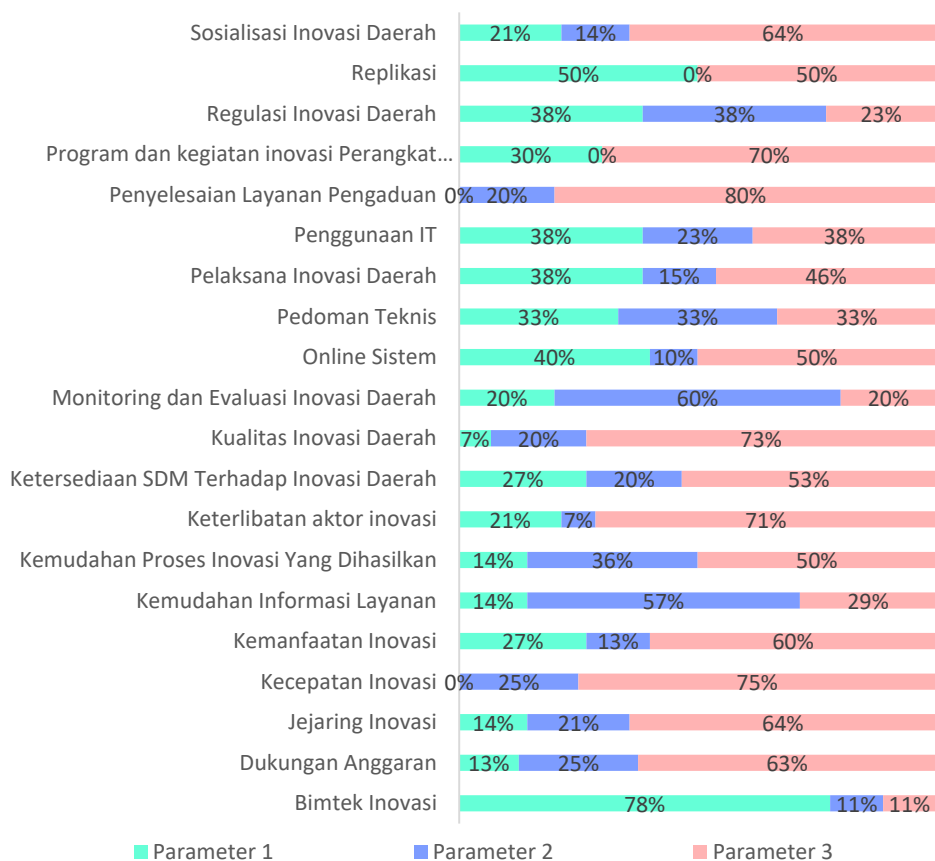


Gambar 80. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Ternate

Dari 15 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Ternate, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 26.33% sedangkan 73.67% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, dan Kemanfaatan Inovasi merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kota Ternate telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung

yang paling rendah adalah indikator Replikasi, yaitu sebesar 13% artinya hanya 2 dari 15 inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 81. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kota Ternate

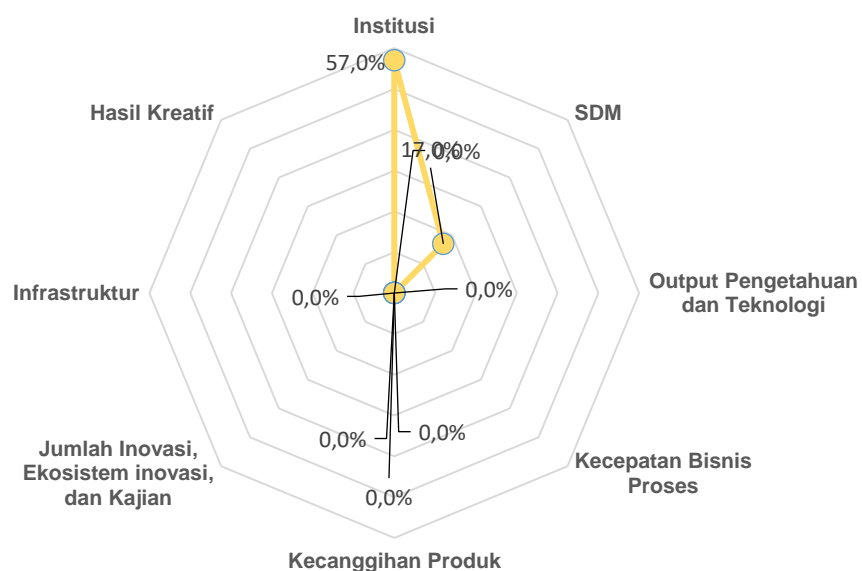
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan sebesar 80%, artinya 80% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah sebesar 60%, artinya 60% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi sebesar 78% artinya 78% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Bimtek Inovasi.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Pulau Morotai beserta Skor Kematangannya

Tabel 8. Daftar Inovasi Kabupaten Pulau Morotai beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Pengembangan Wisata Taman Bumi (Geopark) Batu Angus Berbasis Komunitas	150
SISTEM INTERAKTIF MANAJEMEN PELAYANAN (SIMPEL - BPKAD)	112
TITIAN (Ternate Impian Tiap Anak)	111
LENERA (LAYANAN TEKNIS KETENAGAKERJAAN)	110
SELAMAT (SELESAI LANGSUNG ANTAR KE ALAMAT)	100
BERWISATA KE PULAU HIRI LAYAK ANAK	93
“Strategi Akselerasi Gerakan Doti Sehat (Dapati, ObaTI, Sembuh dan seHAT)”	71
JAGA TERNATE (Jaringan Siaga Ternate)	68
PARIS KOTA : PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS	52
Diskusi Propublik	50
KORO DINA	40
OJEK SAYUR PEDULI COVID	37
KADO NIKA	36
Wisuda Baca Tulis Alquran	33
Festival Moti Verbond Kecamatan Moti	23

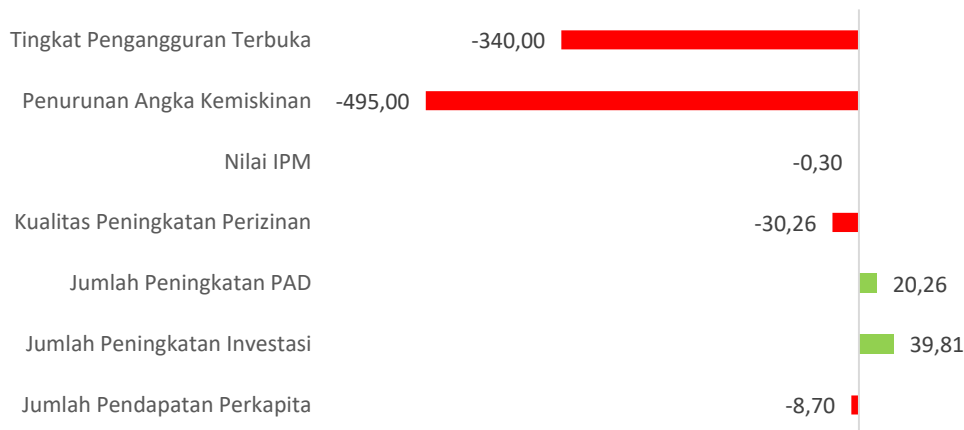
J. KOTA TIDORE KEPULAUAN



Gambar 82. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Tidore Kepulauan

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Tidore Kepulauan memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi yaitu 57.0%. Artinya secara umum indikator pada variabel Institusi memiliki skor yang mendekati skor parameter 2. Mayoritas variabel indeks inovasi daerah pada Kota Tidore Kepulauan memiliki skor sebesar 0%, yaitu variabel Hasil Kreatif, Output Pengetahuan dan Teknologi, Kecepatan Bisnis Proses, Kecanggihan Produk, Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian, dan Infrastruktur. Artinya indikator - indikator pada variabel tersebut tidak terisi data pendukung.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 83. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Tidore Kepulauan

Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Tidore Kepulauan belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan Nilai IPM turun sebesar 0.30% dimana nilai tersebut lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan juga mengalami penurunan sebesar 30.26% dimana nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%.

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengalami peningkatan pada Jumlah Peningkatan PAD sebesar 20.26%, dimana nilai tersebut lebih besar dan sudah lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 8%. Demikian juga dengan Jumlah Peningkatan Investasi yang meningkat sebesar 39.81% nilai tersebut juga sudah lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0.45%. Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kota Tidore Kepulauan turun sebesar 8.70% dimana seharusnya standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan penurunan hanya sebesar 1.85%. Sedangkan untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dan Penurunan Angka Kemiskinan tidak dapat diinterpretasikan karena data yang diinput oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak sesuai.

Berdasarkan Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan hanya mengisi Aspek Satuan Pemerintah Daerah saja dan tidak ada inovasi yang dilaporkan pada Aspek Satuan Inovasi Daerah.



BAB I

PENDAHULUAN

Fokus pembahasan pada bagian ini akan dibatasi pada hal-hal yang menjadi kekurangan pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku Utara pada variabel-variabel dan indikator satuan Inovasi daerah dan perumusan rekomendasi berdasarkan hal tersebut. Ini dikarenakan variabel dan indikator tersebut merupakan indikator input dan proses pendorong inovasi, sementara variabel dan indikator pada satuan pemerintah daerah adalah indikator makro pemerintah daerah yang ditempatkan sebagai indikator output makro pada pemerintah daerah.

A. KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Kabupaten Halmahera Barat pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 50.20 dan masuk pada kategori Inovatif. Melihat Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Halmahera Barat pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah tidak ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi masih dapat dilakukan pada variabel kecanggihan produk karena masih di bawah 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 9. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Halmahera Barat Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi

Berdasarkan Gambar 8. pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Halmahera Barat tersebar di 7 (tujuh) urusan yaitu statistik, persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, keuangan, kesehatan, kelautan dan perikanan. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar hanya ada di 1 (satu) urusan yakni kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagai menjadi 6(enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8(delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi

antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Halmahera Barat menunjukkan bahwa mayoritas inovasi sudah menunjukkan nilai kematangan tinggi. Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa hampir keseluruhan indikator telah diisi dan mempunyai bukti dukung kecuali terkait replikasi dan program kegiatan inovasi perangkat daerah dalam RKPD.

Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter sudah banyak yang berada parameter 3, namun masih dapat dioptimalkan lagi pada indikator yang menunjukkan keterisian dokumen yang berada pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 10. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Halmahera Barat

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Replikasi (0%)	1. Replikasi (0%)
2. Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD (20%)	2. Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD (0%)
3. Dukungan Anggaran (40%)	3. Penyelesaian Layanan Pengaduan (0%)
	4. Monev Inovasi Daerah (0%)
	5. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah (0%)
	6. Regulasi Inovasi Daerah (20%)
	7. Pedoman Teknis (20%)
	8. Kemudahan Informasi Layanan (20%)
	9. Online Sistem (25%)
	10. Penggunaan IT (40%)
	11. Kemanfaatan Inovasi (40%)
	12. Bimtek Inovasi (40%)

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

B. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Kabupaten Halmahera Selatan pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 11.32 dan masuk pada kategori Kurang Inovatif. Melihat Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Halmahera Selatan pada bab sebelumnya

menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah bahwa terdapat variabel yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu variabel hasil kreatif, infrastruktur, kecanggihan produk, kecepatan bisnis proses, serta output pengetahuan dan teknologi, karena variabel tersebut berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021) sehingga perlu dilakukan optimalisasi. Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 11. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah	menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah perda jika Perda, untuk penerapan inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau Perkada, untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan inovasi
	Dukungan anggaran	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
	Penggunaan IT	penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi
	Bimtek inovasi	melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola inovasi
	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
	dalam RKPD	dalam proses penganggaran
Output Pengetahuan dan Teknologi	Keterlibatan aktor inovasi	melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan, memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah
	Pelaksana inovasi daerah	membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada
	Jejaring inovasi	bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda, meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi
	Sosialisasi Inovasi Daerah	melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkannya kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat, tanggap menindaklanjuti aduan yang ada dan menginventarisir seluruh aduan dan tinjunctya sebagai bahan perbaikan layanan
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi
Hasil Kreatif	Kemanfaatan inovasi	menyebarkannya inovasi agar kemanfaatannya dapat dirasakan lebih besar atau luas

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	melakukan monev inovasi secara berkala, membuka kesempatan kepada pihak luar untuk memberikan feed back atau mereview kegiatan inovasi
	Kualitas inovasi daerah	menyusun rencana ataupun template pembuatan video dengan memuat semua unsur yang diminta dan menyebarkan kepada OPD sebagai pengampu kegiatan inovasi

Berdasarkan Gambar 19. pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Halmahera Selatan tersebar di 3 (tiga) urusan yaitu perhubungan, pariwisata, dan kesehatan. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar hanya ada di 1 (satu) urusan yakni kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagi menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan bahwa semua inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa keseluruhan indikator tidak mempunyai bukti dukung.

Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa seluruh parameter tidak terisi bukti dukung, sehingga perlu dioptimalkan.

Tabel 12. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Halmahera Selatan

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
- semua indikator tidak terisi bukti dukung (keterisian dokumen 0%)	- semua indikator tidak terisi bukti dukung (keterisian dokumen 0%)

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah,

melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

C. KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Kabupaten Halmahera Tengah pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 29.15 dan masuk pada kategori Kurang Inovatif. Melihat Gambar 23. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Halmahera Tengah pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah tidak ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% bahkan 60% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 dan standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021).

Berdasarkan Gambar 30. pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Halmahera Tengah tersebar di 13 (tiga belas) urusan yaitu pertanian, perpustakaan, perindustrian, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, pariwisata, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, keuangan, kesehatan, kelautan dan perikanan, fungsi penunjang lainnya, energi dan sumber daya mineral. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar ada di 2 (dua) urusan yakni pendidikan dan kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagi menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 31. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Halmahera Tengah menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas dari indikator tidak mempunyai bukti dukung.

Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 33. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter sudah banyak yang berada parameter 3, namun masih dapat dioptimalkan lagi pada indikator yang menunjukkan keterisian dokumen yang berada pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 13. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Halmahera Tengah

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Replikasi (5%)	1. Replikasi (0%)
2. Penyelesaian Layanan Pengaduan (5%)	2. Penyelesaian Layanan Pengaduan (0%)
3. Kemudahan Informasi Layanan (5%)	3. Pedoman Teknis (0%)
4. Pedoman Teknis (10%)	4. Kemudahan Informasi Layanan (0%)
5. Online Sistem (10%)	5. Regulasi Inovasi Daerah (7%)
6. Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan (10%)	6. Penggunaan IT (20%)
7. Bimtek Inovasi (10%)	7. Kualitas Inovasi Daerah (29%)
8. Sosialisasi Inovasi Daerah (14%)	8. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah (33%)
9. Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD (24%)	9. Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD (40%)
10. Penggunaan IT (24%)	10. Monev Inovasi Daerah (40%)
11. Pelaksana Inovasi Daerah (29%)	11. Pelaksana Inovasi Daerah (50%)
12. Keterlibatan Aktor Inovasi (29%)	12. Online Sistem (50%)
13. Jejaring Inovasi (29%)	13. Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan (50%)
14. Monev Inovasi Daerah (48%)	14. Bimtek Inovasi (50%)

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

D. KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Kabupaten Halmahera Timur pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 10.80 dan masuk pada kategori Kurang Inovatif, hal ini dikarenakan daerah tidak mengirimkan laporan inovasi ke Kemendagri. Melihat Gambar 34. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Halmahera Timur pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa hasil dari satuan Inovasi daerah pada seluruh variabel perlu mendapat perhatian khusus yaitu hasil kreatif, infrastruktur, kecanggihan produk, kecepatan bisnis proses, dan output pengetahuan dan teknologi, karena variabel - variabel berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021) sehingga perlu dilakukan optimalisasi. Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 14. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Halmahera Timur Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah	menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah perda jika Perda, untuk penerapan inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau Perkada, untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan inovasi
	Dukungan anggaran	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
	Penggunaan IT	penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi
	Bimtek inovasi	melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola inovasi
	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
Output Pengetahuan dan Teknologi	Keterlibatan aktor inovasi	melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan, memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah
	Pelaksana inovasi daerah	membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada
	Jejaring inovasi	bersinergi dan melakukan kolaborasi internal

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
		pemda, meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi
	Sosialisasi Inovasi Daerah	melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkannya kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat, tanggap menindaklanjuti aduan yang ada dan menginventarisir seluruh aduan dan tinjunctya sebagai bahan perbaikan layanan
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi
Hasil Kreatif	Kemanfaatan inovasi	menyebarkan inovasi agar kemanfaatannya dapat dirasakan lebih besar atau luas
	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	melakukan monev inovasi secara berkala, membuka kesempatan kepada pihak luar untuk memberikan feedback atau mereview kegiatan inovasi
	Kualitas inovasi daerah	menyusun rencana ataupun template pembuatan video dengan memuat semua unsur yang diminta dan menyebarkan kepada OPD sebagai

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
		pengampu kegiatan inovasi

Berdasarkan Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur hanya mengisi Aspek Satuan Pemerintah Daerah saja, namun tidak ada inovasi yang dilaporkan. Untuk daerah dengan kategori ini upaya pembinaan yang perlu dilakukan harus dimulai dari upaya menunmbuhkembangkan Inovasi daerah, sosialisasi regulasi terkait kewajiban pelaporan Inovasi, dan bimtek khusus tata cara pelaporan Inovasi secara keseluruhan.

E. KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Kabupaten Halmahera Utara pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 6.48 dan masuk pada kategori Kurang Inovatif. Melihat Gambar 36. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Halmahera Utara pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah yaitu terdapat variabel yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu hasil kreatif, infrastruktur, kecanggihan produk, kecepatan bisnis proses, dan output pengetahuan dan teknologi, karena variabel - variabel berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021), sehingga perlu dilakukan optimalisasi. Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 15. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Halmahera Utara Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah	menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah perda jika Perda, untuk penerapan inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau Perkada, untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan inovasi
	Dukungan anggaran	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
	Penggunaan IT	penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi
	Bimtek inovasi	melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola inovasi
	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
Output Pengetahuan dan Teknologi	Keterlibatan aktor inovasi	melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan, memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah
	Pelaksana inovasi daerah	membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada
	Jejaring inovasi	bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda, meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi
	Sosialisasi Inovasi Daerah	melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkan ke masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat, tanggap menindaklanjuti aduan yang ada dan menginventarisir seluruh aduan dan tinjutnya sebagai bahan perbaikan layanan
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi
Hasil Kreatif	Kemanfaatan inovasi	menyebarkan inovasi agar kemanfaatannya dapat dirasakan lebih besar atau luas
	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	melakukan monev inovasi secara berkala, membuka kesempatan kepada pihak luar untuk memberikan feedback atau mereview kegiatan inovasi
	Kualitas inovasi daerah	menyusun rencana ataupun template pembuatan video dengan memuat semua unsur yang diminta dan menyebarkan kepada OPD sebagai pengampu kegiatan inovasi

Berdasarkan Gambar 43. pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Halmahera Utara hanya tersebar di 1 (satu) urusan. Dari inovasi yang dilaporkan ti pada urusan wajib pelayanan dasar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagai menjadi 6(enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8(delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar.

Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 44. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan bahwa inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Gambar 45. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa hampir keseluruhan indikator tidak mempunyai bukti dukung.

Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 46. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas parameter tidak terisi bukti dukung, sehingga perlu dioptimalkan.

Tabel 16. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Halmahera Utara

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Sosialisasi Inovasi Daerah (0%)	1. Sosialisasi Inovasi Daerah (0%)
2. Replikasi (0%)	2. Replikasi (0%)
3. Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD (0%)	3. Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD (0%)
4. Penyelesaian Layanan Pengaduan (0%)	4. Penyelesaian Layanan Pengaduan (0%)
5. Penggunaan IT (0%)	5. Penggunaan IT (0%)
6. Pelaksana Inovasi Daerah (0%)	6. Pelaksana Inovasi Daerah (0%)
7. Pedoman Teknis (0%)	7. Pedoman Teknis (0%)
8. Online Sistem (0%)	8. Online Sistem (0%)
9. Monev Inovasi Daerah (0%)	9. Monev Inovasi Daerah (0%)
10. Kualitas Inovasi Daerah (0%)	10. Kualitas Inovasi Daerah (0%)
11. Keterlibatan Aktor Inovasi (0%)	11. Keterlibatan Aktor Inovasi (0%)
12. Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan (0%)	12. Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan (0%)
13. Kemudahan Informasi Layanan (0%)	13. Kemudahan Informasi Layanan (0%)
14. Kemanfaatan Inovasi (0%)	14. Kemanfaatan Inovasi (0%)
15. Kecepatan Inovasi (0%)	15. Kecepatan Inovasi (0%)
16. Jejaring Inovasi (0%)	16. Jejaring Inovasi (0%)
17. Dukungan Anggaran (0%)	17. Dukungan Anggaran (0%)
18. Bimtek Inovasi (0%)	18. Bimtek Inovasi (0%)

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

F. KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Kabupaten Kepulauan Sula pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 3.68 dan masuk pada kategori Kurang Inovatif. Melihat Gambar --- Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kepulauan Sula pada bab sebelumnya menunjukkan

bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah terdapat variabel yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu hasil kreatif, infrastruktur, kecanggihan produk, kecepatan bisnis proses, dan output pengetahuan dan teknologi, karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021), sehingga perlu dilakukan optimalisasi. Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 17. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Kepulauan Sula
Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah	menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah perda jika Perda, untuk penerapan inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau Perkada, untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan inovasi
	Dukungan anggaran	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
	Penggunaan IT	penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi
	Bimtek inovasi	melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola inovasi
	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
	dalam RKPD	melanjutkan ke dalam proses penganggaran
Output Pengetahuan dan Teknologi	Keterlibatan aktor inovasi	melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan, memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah
	Pelaksana inovasi daerah	membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada
	Jejaring inovasi	bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda, meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi
	Sosialisasi Inovasi Daerah	melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkannya kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat, tanggap menindaklanjuti aduan yang ada dan menginventarisir seluruh aduan dan tinjutnya sebagai bahan perbaikan layanan
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
Hasil Kreatif	Kemanfaatan inovasi	menyebarkan inovasi agar kemanfaatannya dapat dirasakan lebih besar atau luas
	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	melakukan monev inovasi secara berkala, membuka kesempatan kepada pihak luar untuk memberikan feedback atau mereview kegiatan inovasi
	Kualitas inovasi daerah	menyusun rencana ataupun template pembuatan video dengan memuat semua unsur yang diminta dan menyebarkan kepada OPD sebagai pengampu kegiatan inovasi

Berdasarkan Gambar 54. pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten kepulauan sula hanya tersebar di 1 (satu) urusan yaitu urusan ketentraman, ketertiban, umum dan perlindungan masyarakat. Dari inovasi yang dilaporkan tersebut merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagi menjadi 6(enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8(delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar.

Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 55. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Kepulauan Sula menunjukkan bahwa inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Gambar 56. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa keseluruhan indikator tidak mempunyai bukti dukung.

Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 57. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa seluruh parameter tidak terisi bukti dukung, sehingga perlu dioptimalkan.

Tabel 18. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Kepulauan Sula

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
- semua indikator tidak terisi bukti dukung (keterisian dokumen 0%)	- semua indikator tidak terisi bukti dukung (keterisian dokumen 0%)

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

G. KABUPATEN PULAU TALIBU

Kabupaten Pulau Talibu pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 0.4 dan masuk pada kategori Kurang Inovatif, hal ini dikarenakan daerah tidak mengirimkan laporan Inovasi ke Kemendagri. Melihat Gambar 58. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Pulau Talibu menunjukkan bahwa hasil dari satuan Inovasi daerah pada seluruh variabel perlu mendapat perhatian khusus yaitu hasil kreatif, infrastruktur, kecanggihan produk, kecepatan bisnis proses, dan output pengetahuan dan teknologi, karena variabel - variabel berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021) sehingga perlu dilakukan optimalisasi. Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Pulau Talibu berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 19. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Pulau Talibu Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah	menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah perda jika Perda, untuk penerapan inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau Perkada, untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan inovasi
	Dukungan anggaran	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
	Penggunaan IT	penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi
	Bimtek inovasi	melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola inovasi
	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
Output Pengetahuan dan Teknologi	Keterlibatan aktor inovasi	melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan, memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah
	Pelaksana inovasi daerah	membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada
	Jejaring inovasi	bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda, meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi
	Sosialisasi Inovasi Daerah	melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkannya kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat, tanggap menindaklanjuti aduan yang ada dan menginventarisir seluruh aduan dan tinjunctnya sebagai bahan perbaikan layanan
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi
Hasil Kreatif	Kemanfaatan inovasi	menyebarkan inovasi agar kemanfaatannya dapat dirasakan lebih besar atau luas
	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	melakukan monev inovasi secara berkala, membuka kesempatan kepada pihak luar untuk memberikan feedback atau mereview kegiatan inovasi
	Kualitas inovasi daerah	menyusun rencana ataupun template pembuatan video dengan memuat semua unsur yang diminta dan menyebarkan kepada OPD sebagai pengampu kegiatan inovasi

Berdasarkan Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pulau Talibu hanya mengisi Aspek Satuan Pemerintah Daerah saja dan tidak ada inovasi yang dilaporkan. Untuk daerah dengan kategori ini upaya pembinaan yang perlu dilakukan harus dimulai dari upaya menumbuhkembangkan Inovasi daerah, sosialisasi regulasi terkait kewajiban pelaporan Inovasi, dan bimtek khusus tata cara pelaporan Inovasi secara keseluruhan.

H. KABUPATEN PULAU MOROTAI

Kabupaten Pulau Morotai pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 64.50 dan masuk pada kategori Sangat Inovatif. Melihat Gambar 58. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Pulau Morotai pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah tidak ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% bahkan 60% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 dan standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021).

Berdasarkan Gambar 65. pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Pulau Morotai tersebar di 34 (tiga puluh empat) urusan. Terdapat seluruh urusan wajib pelayanan dasar yakni urusan sosial, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan urusan kesehatan. Hal ini perlu dipertahankan dan dapat lebih ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

Berdasarkan Gambar 66. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Pulau Morotai menunjukkan bahwa mayoritas inovasi sudah menunjukkan nilai kematangan sedang. Gambar 67. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa keseluruhan indikator telah diisi dan mempunyai bukti dukung kecuali terkait replikasi dan regulasi inovasi daerah.

Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 67. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter sudah banyak yang berada parameter 3, namun masih dapat dioptimalkan lagi pada indikator yang menunjukkan keterisian dokumen yang berada pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 20. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Pulau Morotai

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Replikasi (0%)	1. Replikasi (0%)
2. Regulasi Inovasi Daerah (10%)	2. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah (8%)
	3. Pedoman Teknis (21%)
	4. Kemudahan Informasi Layanan (23%)
	5. Regulasi Inovasi Daerah (33%)
	6. Online Sistem (34%)
	7. Pelaksana Inovasi Daerah (35%)
	8. Penggunaan IT (37%)
	9. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah (40%)
	10. Bimtek Inovasi (42%)

	11. Jejaring Inovasi (53%)
	12. Kualitas Inovasi Daerah (57%)

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

I. KOTA TERNATE

Kota Ternate pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 48.36 dan masuk pada kategori Inovatif. Melihat Gambar 71. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Ternate pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah tidak ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% bahkan 60% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 dan standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021).

Berdasarkan Gambar 78. pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kota Ternate tersebar di 12 (dua belas) urusan yaitu tenaga kerja, perencanaan, perdagangan, pendidikan, penanaman modal, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pariwisata, keuangan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar hanya ada di 3 (tiga) urusan yakni urusan pendidikan, urusan kesehatan, dan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagi menjadi 6(enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8(delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 79. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kota Ternate menunjukkan bahwa proporsi skor kematangan tinggi, skor kematangan sedang, dan skor kematangan rendah memiliki proporsi yang seimbang. Gambar 80. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa keseluruhan indikator telah diisi dan mempunyai bukti dukung.

Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 81. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter sudah banyak yang berada parameter 3, namun masih dapat dioptimalkan lagi pada indikator yang menunjukkan keterisian dokumen yang berada pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 21. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Pulau Morotai

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Replikasi (13%)	1. Bimtek Inovasi (11%)
2. Pelayanan Pengaduan (33%)	2. Monev Inovasi Daerah (20%)
3. Monev Inovasi Daerah (33%)	3. Regulasi Inovasi Daerah (23%)
4. Pedoman Teknis (40%)	4. Kemudahan Informasi Layanan (29%)
5. Dukungan Anggaran (53%)	5. Pedoman Teknis (33%)
	6. Penggunaan IT (38%)
	7. Pelaksana Inovasi Daerah (46%)
	8. Replikasi (50%)
	9. Online Sistem (50%)
	10. Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan (50%)
	11. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah (53%)

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

J. KOTA TIDORE KEPULAUAN

Kota Tidore Kepulauan pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 10.6 dan masuk pada kategori kurang inovatif, hal ini dikarenakan daerah tidak mengirimkan laporan Inovasi ke Kemendagri. Melihat Gambar 82. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Tidore Kepulauan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa hasil dari satuan Inovasi daerah pada seluruh variabel perlu mendapat perhatian khusus yaitu hasil kreatif, infrastruktur, kecanggihan produk, kecepatan bisnis proses, dan output pengetahuan dan teknologi, karena variabel - variabel berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021) sehingga perlu dilakukan optimalisasi. Optimalisasi Inovasi daerah di Kota Tidore Kepulauan berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 22. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kota Tidore Kepulauan Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah	menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah perda jika Perda, untuk

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
		penerapan inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau Perkada, untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan inovasi
	Dukungan anggaran	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
	Penggunaan IT	penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi
	Bimtek inovasi	melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola inovasi
	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
Output Pengetahuan dan Teknologi	Keterlibatan aktor inovasi	melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan, memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah
	Pelaksana inovasi daerah	membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada
	Jejaring inovasi	bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda, meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi
	Sosialisasi Inovasi	melakukan penyebaran informasi kepada

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
	Daerah	masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkan ke masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat, tanggap menindaklanjuti aduan yang ada dan menginventarisir seluruh aduan dan tinjunctya sebagai bahan perbaikan layanan
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi
Hasil Kreatif	Kemanfaatan inovasi	menyebarkan inovasi agar kemanfaatannya dapat dirasakan lebih besar atau luas
	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	melakukan monev inovasi secara berkala, membuka kesempatan kepada pihak luar untuk memberikan feedback atau mereview kegiatan inovasi
	Kualitas inovasi daerah	menyusun rencana ataupun template pembuatan video dengan memuat semua unsur yang diminta dan menyebarkan kepada OPD sebagai pengampu kegiatan inovasi

Berdasarkan Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan hanya mengisi Aspek Satuan Pemerintah Daerah saja dan tidak ada inovasi yang dilaporkan.

Untuk daerah dengan kategori ini upaya pembinaan yang perlu dilakukan harus dimulai dari upaya menumbuhkembangkan Inovasi daerah, sosialisasi regulasi terkait kewajiban pelaporan Inovasi, dan bimtek khusus tata cara pelaporan Inovasi secara keseluruhan.